

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Adapun ringkasannya sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama				
1.1	Nilai AKIP Kementerian	Nilai	73,5	73,5**	100%**
1.2	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Indeks	95%	95%	100%**
1.3	Indeks SPBE	Indeks	3,9	4,00	102,56%
1.4	Indeks Perencanaan	Persentase	97%	97%**	100%**
1.5	Capaian Prioritas Nasional	Persentase	100%	100%	100%
1.6	Capaian Indikator Kinerja Utama	Persentase	100%	100%	100%
1.7	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	>90	>90**	100%**
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas				
2.1	Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	Persentase	70%	70%	100%
2.2	Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan	Persentase	70%	70%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif				
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Sektor yang Ditindaklanjuti	Persentase	90%	90%	100%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerjasama yang Berkualitas				
4.1	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja	Persentase	100%	100%	100%
4.2	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Persentase	100%	100%	100%
4.3	Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	Persentase	100%	100%	100%
4.4	Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan	Persentase	100%	100%	100%
4.5	Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	Persentase	100%	100%	100%

V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas				
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Indeks	3 dari 4	3.52	117,33%
VI	Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian				
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Persentase	85%	85%	100%
6.2	Nilai AKIP Sekretariat	Nilai	82	78,95	96,28%

Keterangan :

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulan

Kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai AKIP Kementerian
2. Indeks Kualitas Kebijakan
3. Indeks SPBE
4. Indeks Perencanaan
5. Capaian Prioritas Nasional
6. Capaian Indikator Kinerja Utama
7. Nilai Kinerja Anggaran

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**1.1. Nilai AKIP
Kementerian**

Latar Belakang

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan tahunan. Penilaian AKIP meliputi empat komponen, yaitu

- a) Perencanaan Kinerja;
- b) Pengukuran Kinerja;
- c) Pelaporan Kinerja; dan
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai AKIP diterima setelah pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) setiap tahun.

Berikut ini merupakan komponen penilaian yang menjadi rujukan nilai LHE dengan pembobotan sebagai berikut :

Komponen yang dinilai	Sub Komponen 1 (Keberadaan) 20%	Sub Komponen 2 (Kualitas) 30%	Sub Komponen 3 (Pemanfaatan) 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Klasifikasi Nilai Evaluasi AKIP :

- AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan
- A (Skor > 80-90); Memuaskan
- BB (Skor > 70-80); Sangat Baik
- B (Skor > 60-70); Baik
- CC (>50-60); Cukup
- C (>30-50); Kurang
- D (0-30); Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV tahun 2025, proyeksi Nilai AKIP Kementerian yang terealisasi sebesar 73,5. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan s.d triwulan IV 2025 pada sisi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, dengan ringkasan :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.1				
1.1. Nilai AKIP Kementerian	Nilai	73,5	73,5**	100%**

(**) : Masih bersifat prediksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta activity yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan.

Berdasarkan surat Kementerian PAN-RB RI tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada tanggal 19 Desember 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemenko Perekonomian sebesar 73,32 dengan predikat 'BB' Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "sangat baik". Persentase capaian kinerjanya pun di tahun 2024 melampaui target 100% yaitu pada angka **100,43%**. Nilai AKIP menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari data capaian nilai AKIP beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Nilai AKIP dari Kemenpan RB		
	2023	2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	23.28	23.48	(23.54)
2. Pengukuran Kinerja	20.03	20.22	(20.27)
3. Pelaporan Kinerja	12.72	12.91	(12.94)
4. Evaluasi Internal	16.50	16.71	(16.75)
Nilai Hasil Evaluasi	72,53	73,32	73,5

Keterangan :

Mempertimbangkan tren dari tahun ke tahun, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama memproyeksikan bahwa capaian SAKIP s.d triwulan IV telah mencapai target yang ditentukan. Didasarkan pada perbaikan yang telah dilakukan proyeksi capaian AKIP 2025 sebagai berikut :

Hingga triwulan ke IV ini pengumpulan dokumen AKIP Kemenko Perekonomian untuk evaluasi penilaian AKIP tahun 2025 telah dilaksanakan pada aplikasi ESR Kemenpan RB dan pada link berikut <https://bit.ly/4g54Xa1>. Dokumen – dokumen itu meliputi Renstra, IKU, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Kinerja, DPA, Pohon Kinerja dan Cascading, Tindaklanjut LHE AKIP Kemenpan, Tindaklanjut LHE AKIP Internal, LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi, Pedoman Teknis pada Perencanaan, Pengukuran, Pengumpulan Data Kinerja dan evaluasi internal.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Nilai AKIP Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Monitoring capaian NKO unit kerja TW III melalui reuiu laporan triwulanan kinerja	Telaksana	Telah dilaksanakan monitoring laporan kinerja yang disampaikan oleh ke deputian dan ke biroan di triwulan III
2	Monev dokumen kepatuhan pengukuran dan pelaporan pada laporan triwulan III unit kerja	Telaksana	Telah diperiksa kembali kesesuaian dokumen kepatuhan dan pelaporan pada laporan kinerja triwulanan III ke deputian dan ke biroan
3	Reuiu dokumen laporan kinerja triwulan III	Telaksana	Telah dilaksanakan reuiu dokumen kinerja seluruh unit kerja di triwulanan III

4	Coaching clinic persiapan penyusunan LAKIP 2025 unit kerja dan kementerian	Telaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP 2025
5	Evaluasi rencana tindak lanjut evaluasi AKIP 2024 yang telah berjalan dan ditetapkan diawal tahun	Telaksana	Telah dilasanakan rapat evaluasi tindaklanjut AKIP 2024
6	Persiapan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026	Telaksana	Telah dilakukan sosialisasi dan <i>coaching clinic</i> penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026

Hingga Triwulan IV tahun 2025, Beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu ;

1. Pelaksanaan rapat hybrid seluruh unit Kerja di Kedepuitan tentang persiapan penyusunan LAKIP 2025 di lingkungan Kemenko Perekonomian pada tanggal 4 Des 2025
2. Pelaksanaan penyusunan seluruh dokumen pendukung evaluasi AKIP tahun 2025 kedalam website Kemenpan RB
3. Penyusunan draft SE Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025
4. Penyusunan laporan kinerja triwulan IV tahun 2025
5. Pelaksanaan evaluasi target kinerja dan rencana aksi yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025

Pelaksanaan renaksi sepanjang Triwulan IV Ta. 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Melaksanakan koordinasi dan rapat bersama beberapa tema dalam 1 kesempatan yang sama.
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Melaksanakan pendalaman kepada Kementerian PAN RB terkait realisasi rekomendasi perbaikan atas Laporan Evaluasi AKIP yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop* online.
- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain, Sebagai contoh anggaran yang diefisienkan pada triwulan IV sebesar Rp.15.000.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan berisiko mengganggu capaian kinerja secara keseluruhan, yaitu :

1. Terdapat kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB tentang Penilaian Kinerja Organisasi

2. Masih terdapat beberapa kedeputian yang memerlukan pendampingan atau masukan terkait laporan LAKIP 2025 dan penyusunan perjanjian kinerja 2026

Adapun upaya yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah :

1. Menyesuaikan dan menyelaraskan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dengan kondisi Kemenko Perekonomian
2. Melaksanakan sosialisasi intens kepada para kedeputian yang memerlukan pendampingan terkait penyusunan LAKIP 2025 dan Perjanjian Kinerja 2026

1.2. Indeks Kualitas Kebijakan

Latar Belakang

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya dalam pilar tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian perwujudan asta cita ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba, judi serta penyelundupan. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan Pemerintah terutama dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence based*). Indikator indeks kualitas kebijakan juga digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas proses penyusunan, koordinasi, dan implementasi kebijakan publik yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kegiatan Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara.

Penilaian IKK Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Kepala LAN No. 8/K.1/HKM.02.3/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Adapun penilaian dilakukan terhadap 3 kebijakan di masing-masing instansi setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari Penilaian Mandiri (self assessment), proses verifikasi oleh LAN, proses umpan balik (feed back) dan perbaikan/penyempurnaan, serta penetapan hasil penilaian akhir.

Instrumen pengukuran IKK terdiri dari 1 Profil dan 5 Dimensi dengan rincian sebagai berikut:

1. Profil dengan bobot 10%
2. Perencanaan Kebijakan dengan bobot 20%
3. Implementasi Kebijakan dengan bobot 25%
4. Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dengan bobot 30%
5. Transparansi dan Partisipasi Publik dengan bobot 15%

Nilai IKK = Indeks komposit tertimbang dari 5 Instrumen Pengukuran.

Kategori Penilaian:

<50,00 = kurang

50,00 – 64,99 = cukup

65,00 – 79,99 = baik

80,00 – 90,99 = sangat baik

91,00 – 100 = unggul

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Indeks Kualitas Kebijakan telah terealisasi sebesar 92,42 (kategori unggul). Nilai ini merupakan penilaian yang diberikan oleh LAN melalui *Board Member* berdasarkan beberapa instrumen pengukuran yang telah dilaksanakan, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.2				
1.2. Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	95	92,42	97,28%

Hingga triwulan IV tahun 2025, Indeks Kualitas Kebijakan yang terealisasi berdasarkan proses tahapan dalam IKK yang meliputi 1 profil 5 dimensi. Kegiatan dalam penilaian IKK dalam rencana aksi tersebut antara lain: (1) Pendataan populasi kebijakan untuk objek penilaian tahun 2025 (TW1); (2) Penetapan Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan (TW2); (3) Proses Penilaian Mandiri (pemilihan kebijakan, pengumpulan bukti dukung, pemeriksaan kelengkapan dan relevansi bukti dukung, submit data input hasil *self-assessment* ke sistem IKK) dan proses umpan balik dan perbaikan serta penyempurnaan (TW 3); (4) Penyampaian hasil penilaian akhir IKK (TW4).

Telah dilaksanakan proses penilaian mandiri (pemilihan kebijakan, pengumpulan bukti dukung, pemeriksaan kelengkapan dan relevansi bukti dukung, submit data input hasil *self-assessment* ke sistem IKK) dan proses umpan balik dan perbaikan serta penyempurnaan. Tim internal Kemenko Perekonomian melakukan skoring terhadap setiap indikator berdasarkan bukti dukung yang ada. Skor diberikan sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam panduan IKK (misalnya skala 0–100). Hasilnya berupa nilai sementara untuk masing-masing dimensi dan total nilai IKK. Hasil penilaian mandiri dibahas bersama pimpinan atau tim *quality assurance internal*. Jika ditemukan bukti kurang lengkap, dilakukan perbaikan atau pelengkapan dokumen. Tujuannya agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kualitas proses kebijakan yang sesungguhnya. Hasil penilaian mandiri beserta bukti dukung diunggah ke aplikasi IKK (online system) yang disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Selanjutnya, verifikator LAN melakukan analisis hasil *self-assessment*, proses *feedback* dari instansi dan penilaian akhir dilakukan oleh Board Member.

Hasil penilaian IKK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 mencapai 92,42 dari skala 100 dengan predikat "Unggul". Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan publik di Kemenko Perekonomian telah memenuhi kaidah-kaidah, mulai dari perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang sangat baik. Untuk penilaian tahun ini menggunakan instrumen yang berbeda dengan penilaian tahun sebelumnya. Pengukuran IKK tahun 2025 ini secara nasional diikuti oleh lebih dari 548 dari 646 total instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimana hasil penilaian akhir IKK 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi salah satu instansi yang masuk dalam kategori Unggul (6,41%) yang merupakan kelompok kategori tertinggi dalam penilaian IKK tersebut.

Hingga triwulan IV tahun 2025, tahapan proses penilaian indeks kualitas kebijakan sebagai berikut:

- Menyusun tim pelaksana pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan untuk tahun 2025.
- Memastikan keterlibatan jabatan fungsional analis kebijakan pada proses pengukuran IKK.
- Mengidentifikasi populasi kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun 3 tahun terakhir (2022-2024);
- Menetapkan Tim Pelaksana pengukuran IKK dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang melibatkan jabatan fungsional analis kebijakan melalui KepSesmenko No.19/2025 tanggal 1 Juni 2025.
- Menentukan 3-4 kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Mengumpulkan bukti dukung pada setiap dimensi indeks kualitas kebijakan.
- Memeriksa kelengkapan dan relevansi bukti dukung.
- Memeriksa *executive summary* dari setiap dimensi indeks kualitas kebijakan.
- Men-submit data input hasil *self-assessment* ke sistem aplikasi IKK.
- Menerima audiensi Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kegiatan *benchmarking* atas keberhasilan Kemenko Perekonomian meraih Predikat Unggul dalam pengukuran IKK Tahun 2023.
- Mengikuti proses verifikasi dan penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan, dimana pada Penganugerahan IKK Tahun 2025 Kemenko Perekonomian kembali meraih Predikat Unggul.
- Menyenggarakan Rapat Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dan Persiapan Penilaian Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan dan peningkatan kualitas kebijakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Indeks Kualitas Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Penyampaian Hasil Penilaian Akhir IKK	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti proses verifikasi dan penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan, dimana pada Penganugerahan IKK Tahun 2025 Kemenko Perekonomian kembali meraih Predikat Unggul

			<p>dari 548 instansi yang berpartisipasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dan Persiapan Penilaian 2026 pada 11 Desember 2025. <p>Melanjutkan proses dalam tahapan IKK yang terlaksana di triwulan I hingga triwulan III, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pendataan pada 227 peraturan yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian, dsb. ● Telah ditetapkan KepSesmenko No.19/2025 pada 1 Juni 2025 tentang Tim Kerja Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ● Telah dilaksanakan pemilihan kebijakan sebagai objek pengukuran kualitas kebijakan yaitu: KUR, DHE, dan Neraca Komoditas. ● Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Bukti Dukung pada 17 Juli 2025, 24 Juli 2025, dan 13 Agustus 2025. ● Telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan relevansi bukti dukung pada 26 Agustus 2025. ● Submit data input hasil <i>self-assessment</i> ke
--	--	--	---

			<p>sistem IKK pada bulan September.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima audiensi Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kegiatan <i>benchmarking</i> atas keberhasilan Kemenko Perekonomian meraih Predikat Unggul dalam pengukuran IKK Tahun 2023 pada 19 September 2025.
--	--	--	--

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Menerima audiensi Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kegiatan *benchmarking* atas keberhasilan Kemenko Perekonomian meraih Predikat Unggul dalam pengukuran IKK Tahun 2023.
- Mengikuti proses verifikasi dan penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan, dimana pada Penganugerahan IKK Tahun 2025 Kemenko Perekonomian kembali meraih Predikat Unggul dari 548 instansi yang berpartisipasi.
- Menyelenggarakan Rapat Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dan Persiapan Penilaian IKK Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan dan peningkatan kualitas kebijakan secara berkelanjutan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai
- Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain, sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.45.560.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala/hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain:

- adanya reorganisasi/perubahan SOTK sehingga relatif terhambat dalam mengakses bukti dukung di unit kerja yang lama (unit kerja sudah tidak ada);
- Output/keluaran kebijakan belum terstandar antar unit kerja;

- Pemahaman instrumen pengukuran belum merata di seluruh unit kerja.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka dilakukan beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

- Mengintensifkan komunikasi dengan pihak LAN selaku evaluator IKK dalam rangka konsultasi.
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan unit kerja untuk meningkatkan pemahaman instrumen dan kualitas bukti dukung di tiap kebijakan.
- Menyelenggarakan Dialog kinerja secara rutin untuk mengintensifkan koordinasi dengan unit kerja serta pemantauan dan evaluasi kinerja agar berjalan optimal.
- Menginisiasi pengembangan rancang bangun Sistem Informasi Pengelolaan *Evidence* Kebijakan.

1.3. Indeks Layanan Penerapan SPBE

Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal tersebut telah tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan melalui tata kelola dan manajemen dari sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan proses penilaian di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kemudian menghasilkan suatu nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pemerintah. Penilaian pada penerapan SPBE sebagai bagian dari pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada instansi pusat dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. SPBE meliputi beberapa domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Unsur penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ada 3 (tiga), yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya;
2. Kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya;
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang dijelaskan sebagai berikut:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan

- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan penilaian evaluasi SPBE dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	10	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	4	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Pelaksanaan Audit TIK	3	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik Berbasis Elektronik	6	18%

Klasifikasi Nilai SPBE :

- 4,2 s.d 5,0 (Memuaskan)
- 3,5 s.d < 4,2 (Sangat Baik)
- 2,6 s.d < 3,5 (Baik)
- 1,8 s.d < 2,6 (Cukup)
- < 1,8 (Kurang)

*) Target penilaian : Predikat Baik (Indeks minimal 2,6)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3,9. Penetapan target untuk tahun 2025 didasarkan pada penilaian hasil evaluasi SPBE Tahun 2024.

Hasil Indeks SPBE menggunakan hasil Evaluasi SPBE pada Tahun 2024 karena sesuai dengan pernyataan dari Kementerian PAN-RB, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak mengikuti pemantauan sehingga menggunakan nilai indeks SPBE pada tahun sebelumnya. Disamping itu, disebabkan pada tahun 2026 nanti SPBE resmi bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI). Saat ini, masih dilaksanakan pembinaan terkait transisi dalam rangka memberikan pemahaman arah kerangka kerja Pemerintah Digital sebagai penguatan atas progres penerapan SPBE sebelumnya. Adapun tabel perhitungan persentase kinerja Triwulan IV sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.3 1.3. Indeks SPBE	Indeks	3,9	4,00	102,56%

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 yaitu telah dilaksanakan Optimalisasi layanan SPBE terintegrasi, Pengembangan layanan SPBE dilakukan sebagai inovasi dan respon atas kebutuhan pengguna SPBE serta Mengoptimalkan infrastruktur dan keamanan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

IKU. Indeks SPBE Kementerian			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Mengoptimalkan strategi implemementasi arsitektur SPBE pada masa transisi perubahan versi Sistem Informasi Arsitektur versi 2 ke versi 3 dengan mengikuti bimtek arsitektur SPBE	Terlaksana	Dilakukan bimtek arsitektur SPBE Sistem Informasi Arsitektur versi 3 dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kolaborasi ekosistem digital. Terdapat perubahan pada versi 3 yang terdiri dari 3 level berbeda dalam arsitektur sehingga memerlukan perencanaan arsitektur lebih lanjut.
2	Meningkatkan kapasitas SDM SPBE dengan mengikuti pelatihan TIK dan Digitalisasi Pemerintah	Terlaksana	Dilakukan peningkatan kapasitas SDM SPBE melalui pengadaan pelatihan TIK dan Digitalisasi Pemerintah yang perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan SDM yang kompeten dan adaptif
3	Mengikuti sosialisasi terkait Transformasi Pemerintah Digital	Terlaksana	Dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait transformasi Pemerintah Digital untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam setiap unit organisasi

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD) pembangunan Dashboard Paket Ekonomi;
2. Melakukan penilaian IKASANDI (Instrumen Kematangan Keamanan Siber dan Sandi) untuk tahun 2025;
3. Mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD) terkait Pembinaan Statistik Sektorial tematik;
4. Mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD) Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional (AIKITA);
5. Mengikuti Bimbingan Teknis Penggunaan Portal INA-OECD.
6. Mengikuti Rakortek Penajaman DP2026 dan Pemetaan Kebutuhan Data Dukung Daerah.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya diselenggarakannya rapat koordinasi terkait SPBE menggunakan aplikasi zoom yang dapat menghemat anggaran. Kemudian penggunaan Kembali fasilitas ruang rapat kantor untuk rapat koordinasi sehingga proyeksi efisiensi lebih maksimal dan hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lain.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.35.880.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Ta. 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian sehingga mempengaruhi tindak lanjut evaluasi pelaksanaan SPBE 2024 yang harus menyesuaikan arah kebijakan, proses bisnis dan pemutakhiran Arsitektur SPBE.
2. Belum tersedianya informasi resmi dari Kementerian PANRB mengenai jadwal pemantauan SPBE, sehingga menghambat pelaksanaan sosialisasi penilaian SPBE.
3. Keterbatasan sumber daya teknis dalam mendampingi pengembangan *dashboard* aplikasi.
4. Adanya perubahan prioritas kegiatan pada tingkat kementerian yang berdampak pada penjadwalan ulang beberapa agenda teknis, termasuk finalisasi laporan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan, yaitu

1. Melakukan penyesuaian rencana tindak lanjut evaluasi SPBE 2024 sesuai arah kebijakan baru melalui revisi proses bisnis, pemutakhiran Arsitektur SPBE, dan koordinasi lintas unit kerja pasca perubahan struktur organisasi.
2. Melakukan komunikasi proaktif dan intensif dengan Kementerian PANRB guna memperoleh kepastian informasi terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
3. Mengoptimalkan koordinasi internal lintas unit kerja untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyusunan dokumen bukti dukung penilaian SPBE.

4. Memperkuat dukungan teknis melalui pelibatan SDM TI yang kompeten serta menjadwalkan sesi pendampingan intensif dalam pengembangan dashboard.
5. Menindaklanjuti hasil masukan prngguna dengan penyusunan rekomendasi teknis pengembangan system
6. Menyusun ulang prioritas kegiatan dan timeline pelaksanaan teknis secara realistis agar tetap selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Pembangunan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja pada kementerian/lembaga. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini. Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh K/L sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Metode pengukuran IPPN dilakukan dengan menilai hasil dari dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun oleh K/L dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. Dikarenakan karakteristik dan mekanisme penyusunannya yang berbeda, maka untuk penilaian terhadap IPPN K/L dilakukan dengan menggunakan parameter yang berbeda.

Penilaian IPPN ini dapat menggambarkan kondisi perencanaan pada instansi dalam hal tingkat keselarasan perencanaan di Pemerintah Pusat, tingkat kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan, dan kualitas dokumen perencanaan dalam menyelesaikan isu pembangunan serta mencapai prioritas pembangunan.

Komponen penilaian IPPN adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	SUB KOMPONEN	DOKUMEN YANG DINILAI
1	Integrasi	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	Renstra-RPJMN
		Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra	Renstra-Renja
		Kepatuhan Renja terhadap RKP	Renja-RKP
2	Sinkronisasi	Kepatuhan anggaran K/L untuk mencapai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan	RKA-RKP
		Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja	RKA-Renja
		Kepatuhan anggaran K/L untuk memblayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan	RKA-RKP
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan	Target dan Sasaran Pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja Lembaga terkait	RPJMN-Renstra K/L

	Perencanaan Kinerja	
--	---------------------	--

Pada tahun 2025, IPPN tidak menilai sub komponen 1.a. yaitu kepatuhan Renstra terhadap RPJMN—dikarenakan Renstra 2025-2029 belum ditetapkan atau mulai difinalisasi pada periode itu. Komponen 3 juga belum dinilai pada tahun 2024, karena pada RPJMN 2020-2024, Kemenko Perekonomian belum menjadi pengampu Pro-P tertentu.

Rekomendasi yang diberikan oleh penilai untuk meningkatkan indeks perencanaan Kemenko Perekonomian adalah:

1. Meningkatkan keselarasan Nomenklatur Sasaran Strategis dan/atau Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja/Strategis/Program/Kegiatan Renja K/L dengan Renstra K/L seluruhnya
2. Mempertahankan konsistensi Nomenklatur, Indikator, dan Target Output Prioritas Renja K/L dengan Sasaran Output Proyek Prioritas dalam Prioritas Nasional RKP.
3. Memastikan Total Pagu Anggaran pada RKA K/L untuk setiap Nomenklatur sinkron dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L.
4. Meningkatkan kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Output Proyek Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi Nomenklatur dan Alokasi Anggaran antara RKA K/L dan RKP dalam Koridor PN.
5. Memastikan Anggaran Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN terealisasi dan sama nilainya dengan Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 dengan predikat Sangat Baik dengan nilai 97. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dengan tanpa target triwulan. Penilaian IPPN kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, dengan predikat sebagai berikut:

Rentang Nilai	Predikat
91-100	Sangat Baik
81-90	Baik
71-80	Cukup Baik
61-70	Kurang
<60	Sangat Kurang

Pada triwulan IV tahun 2025, nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional belum memiliki nilai realisasi, karena hasil penilaian IPPN dilakukan Bappenas dan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Namun, prakiraan dari

nilai yang akan diperoleh di akhir tahun dapat diprediksi melalui pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.4				
1.4. Indeks				
Perencanaan	Indeks	97%	97%**	100%**
Pembangunan				
Nasional				

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 telah tercapai 100%.

Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada Triwulan IV telah melakukan:

- Sub komponen Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra
Diupayakan tercapai dengan menyusun Renja Kemenko Perekonomian 2026 secara simultan dengan penyelesaian Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 dan menyusun Revisi Renja 2025 yang disesuaikan dengan Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029.
- Sub komponen Kepatuhan Renja terhadap RKP
Diupayakan tercapai dengan menginventarisasi kebutuhan revisi Renja Kemenko Perekonomian Tahun 2025; salah satunya menyesuaikan target indikator Renja dengan Pemutakhiran RKP 2025 dan mengupayakan tidak terjadi pergeseran pada anggaran RO PN. Selain itu Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menyusun dan menyampaikan usulan Revisi Renja 2025.
- Sub komponen Kepatuhan anggaran K/L untuk mencapai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan
Diupayakan dengan menyusun RKA K/L sesuai dengan yang ditetapkan pada SB Pagu Indikatif. Perubahan terkait kebutuhan anggaran dan *tagging* RO Prioritas (RO PN) disampaikan dalam forum *Trilateral Meeting* bersama Kemenkeu dan Bappenas untuk dapat diakomodir dalam finalisasi RKP.
- Sub Komponen Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja
Diupayakan dengan menyusun Renja dan RKA mengacu pada yang telah ditetapkan melalui SB Pagu Indikatif untuk selanjutnya diusulkan kembali kebutuhan yang belum terpenuhi.
- Sub komponen Kepatuhan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan
Diupayakan melalui pemantauan dan evaluasi pada aplikasi E-Monev serta penyelesaian Revisi Anggaran (bila diperlukan) terkait Output PN sesuai dengan ketentuan (melalui proses penelaahan bersama Kemenkeu dan Bappenas).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1.	Finalisasi Pagu Anggaran Renja 2025 dengan RKA-K/L 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran Revisi Renja 2025 atas Pemutakhiran RKP 2025 dan Target pada Penjanjian Kinerja 2025 • Mengajukan revisi POK terakhir di 2025 yang telah disinkronkan dengan SPAN Kementerian Keuangan
2.	Persiapan penyusunan laporan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan RO PN 2025	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan proses validasi dan finalisasi laporan capaian RKP 2025 triwulan III bersama Kementerian PPN/Bappenas. • Mengkoordinasikan pelaporan RO Prioritas Nasional untuk triwulan III di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3.	Melakukan Penyesuaian pada RKA-K/L 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran.	Terlaksana	Menyesuaikan Rancangan Renja 2026 dan RKA-K/L 2026 berdasarkan Surat ALokasi Anggaran dari Kemenkeu
4.	Melakukan penyesuaian pada RKA-K/L 2026 dan Finalisasi Renja K/L 2026 berdasarkan perbaikan dokumen TOR dan RAB atas hasil reuiu APIP	Terlaksana	Menyesuaikan Rancangan Renja 2026 dan RKA-K/L 2026 berdasarkan usulan TOR dan RAB unit kerja
5	Menyusun dan mengusulkan penetapan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029.	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyusunan peraturan berdasarkan format Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL

			<p>yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden untuk dapat di legalkan dan di tetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 serta atas kaidah kaidah penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah di susun bersama, dan memperbaiki penyusunan yang belum tepat, membahas bersama Kementerian PPN/Bappenas serta mengakomodasi masukan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya menunggu penetapan Renstra oleh Tim Kementerian PPN/Bappenas
2. Melakukan Pemetaan antara KP, PN, PP, KP, Prop pada data Reorganisasi Renstra Tahun 2025-2029
3. Melakukan koordinasi Pelaporan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Triwulan III tahun 2025 dengan setiap unit kedeputian dan asdep terkait bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS), untuk membahas capaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian tahun 2025.
4. Melakukan sinkronisasi KRISNA-SAKTI pada triwulan III TA 2025 untuk menjaga konsistensi anggaran pada Renja dan RKA-K/L TA 2025 tetap sama.
5. Melakukan pembahasan multilateral bersama instansi/unit kerja di bawah lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian dan Unit Keasdepan yang terkait untuk membahas profil MRPN LS.
6. Melakukan koordinasi bersama mitra di Kementerian PPN/Bappenas— Direktorat PEMPMP dalam proses finalisasi Rancangan Renstra 2025-2029.
7. Melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Kinerja Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan rapat koordinasi bersama menggunakan via aplikasi Zoom yang dapat

menghemat anggaran, pelaksanaan rapat koordinasi yang menggabungkan beberapa agenda.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada periode selanjutnya sebesar Rp.24.000.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain :

- Penyesuaian kebijakan perencanaan nasional yang ditetapkan mendekati batas waktu penyusunan dokumen perencanaan.
- Unit kerja sulit memproyeksikan target antara (2026 s.d. 2028) dari indikator kinerja yang diusulkan pada lampiran Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029.

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

- Memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas sejak tahap awal penyusunan perencanaan.
- Penyelarasan Program Kerja bersama K/L di bawah lingkup koordinasi untuk penyusunan Renja tahun 2026.
- Penyelenggaraan Forum Finalisasi Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Forum Harmonisasi Rancangan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029.

1.5. Capaian Prioritas Nasional

Latar Belakang

Indeks Perencanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Prioritas Nasional merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana Kemenko Perekonomian berkontribusi secara langsung dalam mengoordinasikan dan mengawal program-program yang mendukung Prioritas Nasional sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis nasional.

IKU ini menilai kinerja efektivitas Output K/L dengan membandingkan capaian dan target Rincian Output (RO) yang mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional.

Penilaian IKU Capaian Prioritas Nasional mengacu pada metodologi evaluasi yang digunakan oleh Kemen PAN-RB melalui lembar kerja evaluasi. Nilai Capaian Prioritas Nasional didapat dari Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang tercapai dibandingkan dengan Jumlah target RO yang mendukung Prioritas Nasional yang diampu.

Rincian Output yang mendukung Prioritas Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah:

- Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi

- Rekomendasi Kebijakan dalam Percepatan Pengembangan Ekonomi Digital Nasional 2025-2030
- Rekomendasi Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional
- Rekomendasi Kebijakan terkait Proses Akses Indonesia ke OECD
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
- Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor
- Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi
- Rekomendasi Perencanaan dan Pembentukan KEK
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK
- Rekomendasi Peningkatan Investasi Kerja Sama Komunikasi dan Sistem Informasi di KEK
- Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Kartu Prakerja
- Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV tahun 2025, Capaian RO yang mendukung PN diproyeksikan telah terealisasi sebesar 100. Nilai ini merupakan penilaian mandiri oleh unit kerja berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan pada sisi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang telah selesai dilaksanakan hingga Triwulan IV 2025. dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.5				
1.5. Capaian Perencanaan Prioritas Nasional	%	100%	100%	100%

Berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh unit kerja pengampu, Capaian RO yang mendukung Prioritas Nasional diproyeksikan telah mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan target capaian IKU pada triwulan IV sebesar 100%. Laporan kinerja ini dibuat untuk dapat memetakan langkah korektif strategis demi tercapainya target nilai yang ditetapkan, perbaikan format laporan Capaian Prioritas Nasional Tahun ini untuk mendukung pelaporan yang lebih komprehensif.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indeks Perencanaan Prioritas Nasional			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Monitoring capaian kinerja RO PN Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan data capaian kinerja RO yang mendukung PN pada Triwulan IV tahun 2025
2	Menyusun Dokumen Rencana Aksi RO PN Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi RO PN Tahun 2026

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.18.500.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Pencapaian RO tidak selalu mencerminkan pencapaian Indikator Prioritas Nasional (PN), karena meskipun target RO telah tercapai, hal tersebut tidak serta-merta menjamin tercapainya target Indikator PN.
- Pelaporan pencapaian RO PN belum seluruhnya selesai pada akhir periode Triwulan IV, sehingga diperlukan perpanjangan waktu pelaporan hingga bulan Januari 2026.
- Adanya blokir anggaran berdampak pada kualitas pelaksanaan RO PN, sehingga meskipun target RO PN tercapai, hasil yang diperoleh belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi Indikator Kinerja PN.

Upaya perbaikan pencapaian target yang dilakukan:

- Melakukan Koordinasi dengan Unit Kerja dalam penyusunan Rencana Aksi dalam Pelaksanaan RO PN tahun 2026
- Melakukan Sinkronisasi Rencana Aksi Pelaksanaan RO PN tahun 2026 dengan Rencana Aksi pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 Unit Kerja terkait (pengampu RO PN)

1.6 Capaian Indikator Kinerja Utama

Latar Belakang

Indikator capaian indikator kinerja utama adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mencapai target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja. IKU ini dirancang agar mendapat cerminan hasil strategis yang ingin dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun IKU yang menjadi indikator penilaian meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Biaya logistik
3. Pembentukan modal tetap bruto
4. Rasio PDB industri pengolahan
5. Devisa pariwisata
6. Rasio PDB pariwisata
7. Indeks ketahanan energi
8. Indeks daya saing digital di tingkat global
9. Tingkat inflasi
10. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
11. Tingkat pengangguran terbuka

Capaian IKU dihitung berdasarkan realisasi terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi, akurasi, dan konsistensi data. Penilaian capaian IKU mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kualitas koordinasi lintas sektor yang menjadi mandat utama Kemenko Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian adalah 100% dengan demikian nilai Capaian Kinerja IKU ini Adalah sebesar 100% atau sangat memuaskan. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan hingga Triwulan IV 2025. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.6				
1.6. Capaian Indikator Kinerja	%	100%	100%	100%

Hingga Triwulan IV tahun 2025, disampaikan sebagai berikut :

- Berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,12% (year-on-year), sedikit di bawah target triwulanan sebesar 5,3% atau mencapai 96,6% dari target. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan di hampir seluruh sektor, dengan kontribusi terbesar berasal dari jasa lainnya (11,31%), jasa perusahaan (9,31%), transportasi dan pergudangan (8,52%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,04%). Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh 10,67%, sementara pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat 6,99%. Secara spasial, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,83%, diikuti oleh Pulau Jawa (5,24%) dan Pulau Sumatera (4,96%). Struktur ekonomi nasional masih didominasi oleh Industri Pengolahan (18,67%), Pertanian (13,83%), dan Perdagangan (13,02%), dengan kontribusi ketiganya mencapai lebih dari 45% terhadap total PDB nasional. Secara umum, capaian pertumbuhan ekonomi triwulan II Tahun 2025 menunjukkan tren positif dan tetap berada dalam jalur menuju target tahunan 5,3%.

- Biaya logistik nasional tercatat sebesar 14,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau mencapai 94,23% dari target yang ditetapkan sebesar 13,52%. Sejak tahun 2018, biaya logistik nasional berhasil turun dari 23,8% menjadi 14,3% terhadap PDB, mencerminkan peningkatan efisiensi sistem logistik nasional secara bertahap. Kemenko Perekonomian melaksanakan sejumlah langkah strategis, antara lain revisi regulasi sistem logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur logistik di luar Pulau Jawa, serta pemberian insentif fiskal dan penyederhanaan birokrasi perizinan bagi pelaku usaha logistik. Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan implementasi Rencana Aksi Penguatan Sistem Logistik Nasional.
- Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar 27,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau 94,62% dari target sebesar 29,4%. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan investasi domestik yang tetap positif, dengan laju pertumbuhan PMTB sebesar 6,99% (year-on-year) pada triwulan IV tahun 2025. Kinerja ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,12%, serta lebih baik dari periode yang sama tahun 2024 yang tumbuh 4,42%. Secara keseluruhan, kinerja PMTB menunjukkan arah yang positif dan menjadi indikator penting dari pemulihan dan percepatan investasi produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
- Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan terhadap total PDB nasional tercatat sebesar 18,67%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap struktur ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan IV 2025 mencapai 5,02% (year-on-year). Peningkatan ini didorong oleh subsektor makanan dan minuman, kimia dasar dan farmasi, serta logam dasar dan alat angkut
- Devisa pariwisata Indonesia tercatat sebesar USD 6,82 miliar, atau mencapai 94,7% dari target triwulanan sebesar USD 7,2 miliar. Capaian ini menunjukkan kinerja positif sektor pariwisata yang pulih pascapandemi,. Secara keseluruhan, capaian devisa pariwisata mencerminkan kebangkitan sektor pariwisata nasional yang semakin kuat, sekaligus menjadi sumber penting bagi peningkatan cadangan devisa dan penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis jasa.
- Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata terhadap total PDB nasional tercatat sebesar 3,83%, atau mencapai 95,75% dari target sebesar 4,0%. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata terus berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, meskipun pertumbuhannya sedikit di bawah target yang ditetapkan.
- Indeks Ketahanan Energi Nasional tercatat sebesar 6,94 pada skala 1–10, atau mencapai 96,5% (capaian kinerjanya) dari target sebesar 7,19. Capaian ini menunjukkan bahwa ketahanan energi nasional masih berada dalam kategori “tinggi dan stabil”, Pertumbuhan positif dalam indeks ketahanan energi didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain penurunan impor bahan bakar minyak sebesar 3,8%, peningkatan pangsa energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,6%, serta stabilisasi pasokan listrik nasional dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,87%. Selain itu, kapasitas pembangkit listrik EBT juga mengalami peningkatan menjadi 13,2 GW, naik dibandingkan 12,7 GW pada tahun sebelumnya.
- Indeks Daya Saing Digital Indonesia di tingkat global tercatat dengan skor 61,36 dan berada pada peringkat ke-45 dari 67 negara. Pada capaian ini

menunjukkan adanya peningkatan posisi dibanding tahun sebelumnya, di mana Indonesia menempati peringkat ke-49. Kenaikan ini menandakan penguatan kapasitas digital nasional, terutama dalam aspek adopsi teknologi informasi, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi dan kompetensi digital masyarakat.

- Tingkat inflasi tercatat sebesar 2,91% (year-on-year) atau mencapai 97,0% dari target yang ditetapkan sebesar 3,0%. Capaian ini menunjukkan bahwa inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia, serta menggambarkan stabilitas harga yang terjaga dengan baik di tengah dinamika perekonomian global dan fluktuasi harga komoditas. Pengendalian inflasi didukung oleh sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia melalui **Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID)**. Upaya tersebut mencakup optimalisasi pasokan bahan pangan, koordinasi distribusi antarwilayah, serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berfokus pada peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok.
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal tercatat sebesar 54,62% dari total penduduk bekerja, atau mencapai 97,53% dari target yang ditetapkan sebesar 56,0%. Capaian ini menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi oleh sektor formal, meskipun peningkatannya berjalan moderat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan proporsi tenaga kerja formal didorong oleh pemulihan aktivitas ekonomi, stabilitas sektor industri manufaktur, serta pertumbuhan sektor jasa modern seperti logistik, teknologi informasi, dan keuangan digital. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan pemerintah seperti Program Kartu Prakerja, perluasan lapangan kerja padat karya, serta insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) turut juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Secara keseluruhan, capaian proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan arah yang positif menuju struktur ketenagakerjaan yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,69%, atau mencapai 101,52% dari target sebesar 4,62%. Meskipun sedikit di atas target, capaian ini tetap menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menandakan pemulihan pasar tenaga kerja nasional yang terus berlanjut pascapandemi. Penurunan angka pengangguran tertinggi terjadi di sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi juga mencatat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang pesat, terutama di bidang ekonomi digital dan teknologi informasi. Sebagai langkah strategis, Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja inklusif dan berkelanjutan, di antaranya melalui pengembangan pendidikan vokasi berbasis industri, ekspansi program Kartu Prakerja, serta penguatan ekosistem investasi padat karya.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Capaian Indikator Kinerja Utama			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Pelaporan capaian kinerja triwulan IV	Terlaksana	Capaian kinerja pada laporan kinerja TW IV memenuhi ekspektasi di angka 100%
2	Evaluasi pelaksanaan Renaksi tahun 2024	Terlaksana	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan renaksi melalui forum dialog kinerja
3	Pemetaan strategi perbaikan yang dilakukan pada triwulan IV	Terlaksana	Perbaikan atas evaluasi pelaksanaan renaksi telah dilaksanakan dan tertuang pada Laporan Kinerja Menteri
4	Penguatan forum dialog kinerja organisasi triwulan IV	Terlaksana	Melaksanakan forum – forum diskusi internal terkait kinerja baik berupa breakfast meeting dan lain-lain

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Penggunaan website Optimalisasi Kinerja Ekon.Go untuk mempermudah pengumpulan laporan kinerja dan pengukuran kinerja
2. Pelaksanaan rapat pimpinan tinggi di ruang-ruang rapat Kementerian untuk meningkatkan efisiensi anggaran perjalanan dinas dalam kota
3. Melaksanakan koordinasi bersama via daring melalui Zoom Meeting, membahas tentang capaian, kendala, dan strategi perbaikan

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh jumlah anggaran yang diefisiensikan sebesar Rp.18.672.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Ta 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

1. Konsumsi rumah tangga melambat akibat tekanan harga pangan dan daya beli yang belum pulih.
2. Koordinasi antar K/L yang belum optimal.
3. Birokrasi dan kepastian hukum investasi yang masih menjadi hambatan
4. Ketergantungan pada belanja modal pemerintah, belum cukup kuat di sektor swasta.
5. Ketergantungan pada bahan baku impor dan biaya logistik yang tinggi

6. Keterbatasan kapasitas penerbangan internasional dan rute langsung ke destinasi utama.
7. Ketimbangan kontribusi antar wilayah.
8. Distribusi energi belum merata dan investasi EBT belum optimal.
9. Kapasitas SDM Digital belum merata.
10. Akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi belum merata.
11. Penciptaan lapangan kerja baru belum sebanding dengan pertumbuhan Angkatan kerja.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk dapat mengakselerasi hambatan – hambatan yang muncul.
2. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan paket stimulus ekonomi yang merupakan Langkah konkrit pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
3. Mengakselerasi belanja pemerintah.
4. Mempercepat penetapan Keputusan Presiden tentang Logistik.
5. Mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah.
6. Memperkuat proses *bottle necking* isu-isu prioritas.

1.7 Nilai Kinerja Anggaran

Latar Belakang

Pada Pasal 244 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA melakukan evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian. Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana diamanatkan pada peraturan diatas, perlu adanya pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dilakukan melalui pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara periodik melaporkan data aspek evaluasi kinerja anggaran melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu. Adapun beberapa data yang dilaporkan melalui SAKTI adalah Capaian Rincian Output, capaian sasaran program dan capaian sasaran strategis. Kemudian berdasarkan data yang diinput tersebut, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang terhubung dengan SAKTI melakukan perhitungan secara otomatis dan menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang disampaikan Kementerian Keuangan secara periodik. Nilai kinerja anggaran dimaksud adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input yang dimasukkan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Sejak tahun 2024, penilaian NKA menggunakan rentang nilai dengan lima kategori mengacu kepada PMK Nomor 62 tahun 2023 yaitu:

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	Nilai NKA > 90	Sangat Baik
2.	80 < Nilai NKA ≤ 90	Baik
3.	60 < Nilai NKA ≤ 80	Cukup
4.	50 < Nilai NKA ≤ 60	Kurang
5.	Nilai NKA < 50	Sangat Kurang

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada akhir tahun oleh Kementerian Keuangan. Pada Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, Persentase pencapaian Nilai Kinerja Anggaran diperkirakan telah tercapai sebesar 95,75% dari target Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-1.7				
1.7. Nilai Kinerja SMART Anggaran	Nilai	>90	>90**	100%**

**Proyeksi Capaian Nilai Kinerja Anggaran*

Dengan mendorong realisasi Nilai Kinerja Anggaran untuk mencapai target, diharapkan secara tidak langsung unit kerja akan berusaha mencapai target capaian mulai dari Realisasi Rincian Output, Capaian Output Program, Capaian Sasaran Program dan Capaian Sasaran Strategis serta memperhatikan Standar Biaya Keluaran yang berarti pengelolaan dan kinerja anggaran pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semakin berkualitas.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Nilai Kinerja Anggaran			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Indikator Kinerja Program, dan Capaian Rincian Output pada Triwulan IV Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilakukan pelaporan Indikator Terkait melalui aplikasi E-Monev sebagai media pencatatan sebelum diinput kedalam aplikasi SAKTI yang hasil akhirnya berupa Nilai Kinerja Anggaran
2	Monitorong efisiensi dan efektivitas penggunaan Standar Biaya Keluaran	Terlaksana	Telah dilakukan Pemantauan efisiensi dan efektivitas standar biaya

	Triwulan IV Tahun 2025		
3	Berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait untuk monitoring Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan IV Tahun 2025	Terlaksana	Telah Dilakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan fasilitasi pelaporan capaian output bulanan melalui file berbagi pakai, untuk menjembatani antara aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan dan e-Monev Bappenas.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.58.855.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target, kendala tersebut antara lain:

- Ketersediaan nilai capaian jauh melebihi periode pelaporan kinerja. Nilai Kinerja Anggaran baru dirilis oleh Kementerian Keuangan setelah dua bulan tahun berjalan (Maret).
- Proses pelaporan Nilai Kinerja Anggaran kurang relevan apabila dilakukan setiap periode triwulan, hal ini dikarenakan perubahan kebijakan pelaporan pada aplikasi SAKTI yang semula dilaporkan setiap triwulan menjadi pelaporan akhir setelah periode tahun berjalan berakhir.

Upaya perbaikan pencapaian target yang dilakukan adalah membuat matriks simulasi nilai kinerja anggaran untuk memperkirakan Nilai final Kemenko Perekonomian di akhir tahun.

2 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular
2. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase

Penyelesaian SKP

Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan
3. Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan tingkat input material sirkular dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait tingkat input material sirkular diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait tingkat input material sirkular, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat dan daftar hadir;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua : Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
- Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang.

Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait tingkat input material sirkular.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Persentase Penyelesaian Sikronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah terealisasi sebesar 70%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada Tahapan Ketiga: pengendalian kebijakan melalui monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Tingkat Input Material Sirkular dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-2.1				
2.1. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular	%	70%	70%	100%

Penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Tingkat Input Material Sirkular telah memasuki pada tahap ketiga yaitu pengendalian kebijakan melalui monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Tingkat Input Material Sirkular. Pada tahapan ini telah dilaksanakan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi sirkular di daerah. Hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan di daerah dapat digunakan sebagai masukan untuk evaluasi dan koordinasi serta sinkronisasi kebijakan ekonomi sirkular di tingkat nasional.

Ekonomi sirkular menjadi bagian integral pembangunan nasional yang secara eksplisit diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029 khususnya dalam PN 2 yakni mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Adapun PN indeks ekonomi hijau diterjemahkan dalam 3 indikator PN yaitu pembangunan rendah karbon, pembangunan ekosistem ekonomi sirkular, dan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Berdasarkan studi global, telah teridentifikasi tingkat penggunaan input material sirkular saat ini berada di tingkat 7-8%. Adapun di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan studi mandiri dan menghasilkan bahwa nilai baseline tingkat penggunaan input material sirkular berada di 9% (2024). Perhitungan ini dilakukan secara bertingkat, mulai dari sektoral kemudian sebagai bahan perhitungan di tingkat nasional. Data tersebut menggunakan data primer yang berasal dari perusahaan atau hasil survei yang dijadikan proksi untuk mewakili kinerja sektor secara keseluruhan.

Secara nasional, penyusunan baseline perhitungan Indikator Dasar Nasional Terintegrasi (ANBI) dibangun berdasarkan nilai perhitungan sektoral, baik dalam hal tingkat input material sirkular, daya tahan produk, dan tingkat daur ulang. Perhitungan tingkat nasional menggunakan metode tertimbang, dimana faktor pembobotan yang digunakan adalah kontribusi sektor terhadap PDB. Dari 5 sektor utama fokus Ekonomi Sirkular, sektor/industri dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah Plastik (10.7%) dan Konstruksi (10,1%). Namun secara sektoral, sektor dengan penggunaan input material terbesar adalah sektor/industri Konstruksi (73%) dan Elektronik (18.25%). Perhitungan pencapaian indikator tingkat penggunaan input material RPJMN 2025-2029 akan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku penghasil data perhitungan baseline tingkat input material sirkular dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, namun demikian ke depan dapat berubah jika terdapat transfer knowledge perhitungan.

Peran Kemenko Perekonomian dalam ekonomi sirkular dapat diimplementasikan melalui sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk deregulasi kemudahan untuk industri dalam melakukan daur ulang, mengkoordinasikan kebijakan yang dapat mengubah paradigma produsen dalam mendesain produk agar mempertimbangkan seluruh siklus hidup suatu barang produksi (*Extended Producer Responsibility*), memastikan keberlanjutan kebijakan atau rencana kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, menciptakan ekosistem sirkular melalui mekanisme insentif dan disinsentif, dan mendorong kerja sama dengan sektor publik dan swasta untuk dukungan pembiayaan maupun keahlian.

Hingga triwulan IV Tahun 2025, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Tingkat Input Material Sirkular, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya terkait Tingkat Input Material Sirkular.
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular.
- Penyiapan bahan pembuka acara *International Conference on Circular Economy and Sustainability (ICCES)* yang akan dilaksanakan pada November 2025.
- Koordinasi dengan Asia Zero Emission Community (AZEC) terkait progress Proyek TPPAS Regional Legok Nangka, yang dapat dipertimbangkan menjadi salah satu program pengarusutamaan ekonomi sirkular di Indonesia.
- Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pengukuran indikator ekonomi sirkular

- Menghadiri pembahasan/diseminasi awal kajian Supply Demand dan Tata Kelola Bahan Baku Industri Daur Ulang Plastik di Indonesia dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI)
- Telah dilaksanakan pemilihan Rincian Output unit kerja dan rapat perkembangan program kebijakan strategis di Kemenko Perekonomian yang terkait dengan Ekonomi Sirkular dan Ekonomi Hijau.
- Menghadiri penyusunan kebijakan terkait penerapan ekonomi sirkular, salah satunya Rancangan PermenPerin tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Industri.
- Menghadiri Diseminasi Hasil Kajian Akademis *Extended Producer Responsibility (EPR)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Penerapan Ekonomi Sirkular melalui Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta.

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024. Hal ini dikarenakan indikator kinerja utama Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya. Adanya pelaksanaan koordinasi yang intens pada triwulan ini, maka diprediksi penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kegiatan Ekonomi Sirkular di K/L	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan FGD Pemetaan Urgensi dan Kelembagaan dalam Penerapan Ekonomi Sirkular di Sektor Industri pada 21 Oktober 2025. - Telah dilaksanakan Audiensi Pemangku Kepentingan Pemerintah terkait Kajian Akademis <i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i> oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 4 November 2025. - Telah dilaksanakan Perumusan Tata Kelola dan Instrumen Ekonomi

			<p>Sirkular di Sektor Industri oleh Kementerian Perindustrian pada 4 November 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan FGD Tindak Lanjut dari Dampak Rencana Penerapan RpermenPerin tentang Ekonomi Sirkular Sektor Industri oleh Kementerian Perindustrian pada 13 November 2025. - Telah dilaksanakan Penyusunan Rancangan PermenPerindustrian tentang Rencana Aksi Penerapan Ekonomi Sirkular Sektor Industri pada 12 Desember 2025.
2	<p>Pelaporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Ekonomi Sirkular dan Rekomendasi Perbaikan untuk Tahun 2026</p>	<p>Terlaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Diseminasi Ekonomi Sirkular Sektor Industri pada 1 Desember 2025 - Telah dilaksanakan Diseminasi Hasil Kajian Akademis <i>Extended Producer Responsibility (EPR)</i> oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 17 Desember 2025 - Telah dilaksanakan Pelaporan Hasil Benchmarking Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada 18 Desember 2025.

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Telah dilaksanakan Rapat Kick-off PAGE Indonesia Fase 2 pada 8 Oktober 2025.

- Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Kick-off Meeting Program Prioritas Pekerjaan Hijau pada 24 Oktober 2025.
- Telah dilaksanakan FGS Pendalaman dan Validasi Petunjuk Teknis P3NK, HPT, Carbon Financing, Asset Recycling untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan pada 10-11 November 2025.
- Telah dilaksanakan Policy Dialogue dan Pengumuman Call for Proposal dalam Rangka Percepatan Rantai Nilai Plastik Berkelanjutan di Indonesia pada 3 Desember 2025.
- Telah dilaksanakan Rapat Pemantauan Pelaksanaan RKP 2025 Triwulan III Program Prioritas Lingkup Lingkungan Hidup pada 8 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

- Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh jumlah anggaran yang diefisiensikan sebesar Rp.18.000.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja di kementerian/lembaga terkait sehingga perlunya pendalaman dalam penyusunan rencana aksi.
2. Hingga akhir triwulan IV, masih dalam tahap pemetaan urgensi dan kelembagaan dalam penerapan Ekonomi Sirkular.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

1. Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka implementasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular di Indonesia.
3. Berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dan para pelaku usaha yang terkait dengan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.

2.2 Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan. Proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dikategorikan efektif dan efisien apabila telah melalui setidaknya 3 proses tahapan yaitu:

1. Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan;
2. Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan; dan

3. Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi.

Persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

Tahap 3, bobot 33,3%

Tahap 2, bobot 33,3%

Tahap 1, bobot 33,3%

Penentuan Bobot ini didasarkan pada penugasan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yakni analisis dan harmonisasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja sasaran pembangunan nasional, dan melaksanakan manajemen kinerja, serta kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

Adapun nilai dari persentase penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan diperoleh melalui penilaian dari 3 (tiga) tahapan siklus bisnis proses dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan sebagai berikut:

Tahap Pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan

Pada tahap ini, Biro MKKS mengidentifikasi faktor kunci isu dan permasalahan terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan, melakukan sinkronisasi isu/permasalahan dengan dokumen rencana pembangunan nasional, dan menetapkan fokus koordinasi dan rencana aksi yang akan dilakukan dalam 1 (satu) tahun ke depan (Agenda Setting). Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat dan daftar hadir;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Analisis kebijakan dalam bentuk Paparan/Telaahan staf/Policy brief.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah undangan rapat dan daftar hadir, notula rapat/paparan/risalah, dan hasil analisis kebijakan terkait.

Tahapan Kedua: Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan

Tahapan pelaksanaan koordinasi kebijakan berisikan identifikasi stakeholder yang terlibat, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan koordinasi dan rencana aksi yang bertujuan untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahap pertama. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahap ini, antara lain:

1. Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan;
2. Notula/Risalah/Berita Acara/Paparan;
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat dan daftar hadir, Notula Rapat/Paparan/Risalah, dan konsep kajian/telaahan staf terkait.

Tahapan Ketiga: Pengendalian Kebijakan melalui Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini Biro MKKS berkoordinasi dengan K/L terkait untuk melakukan monitoring melalui pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi terhadap hasil koordinasi dan tindak lanjut untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat

memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini, antara lain:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;
4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah terealisasi sebesar 70%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap ketiga: pengendalian kebijakan melalui monitoring terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga triwulan IV 2025, dengan ringkasan sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-2.2				
2.2. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan				
	%	70	70	100%

Penyelesaian sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah memasuki pada tahap kedua yaitu Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan. Pada tahap ini, telah dilaksanakan identifikasi program kerja eksisting di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan peningkatan partisipasi atau peran perempuan dalam perekonomian dan langkah upaya tindak lanjutnya. Selain itu juga dirumuskan potensi sinergi dan kolaborasi program lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait peningkatan partisipasi/peran perempuan dalam perekonomian.

Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) merupakan salah satu indikator Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Perekonomian. Untuk itu, diperlukan dukungan program kerja di kementerian/lembaga baik yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian maupun yang tidak khususnya terkait dengan peningkatan partisipasi/peran perempuan dalam perekonomian.

Berdasarkan laporan Human Development Index, Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan gender, berada di peringkat 113 dunia, tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan gap yang terus meningkat. Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan menurun menjadi 45% setelah menikah, mayoritas UMKM perempuan beroperasi di sektor informal, dan literasi digital

perempuan lebih rendah meskipun literasi keuangan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Hasil koordinasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian dengan beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, OJK, Bank Indonesia mengidentifikasi sejumlah program unggulan, antara lain:

- Literasi Digital (Kemenkominfo): Program Digital Talent Academy dan Pandu Literasi Digital menjangkau ribuan peserta, termasuk perempuan, untuk meningkatkan keterampilan digital.
- Literasi Keuangan (OJK): Program "Gencarkan" menjangkau 187.140 perempuan melalui 1.535 kegiatan edukasi keuangan hingga Mei 2025.
- Pemberdayaan UMKM (Kemen UMKM): Program LAKSMI dan Entrepreneur Hub mendukung UMKM perempuan, meskipun belum sepenuhnya spesifik untuk perempuan.
- Care Economy (KPPPA): Program Rumah Bersama Indonesia dan peta jalan ekonomi perawatan memperkuat partisipasi perempuan.
- Pariwisata Halal (Kemenpar): Pelatihan pemandu wisata dan digital marketing melibatkan 35-45% peserta perempuan.
- Ekonomi Inklusif (Bank Indonesia): Program Strive Indonesia menargetkan 300.000 UMKM, dengan 190.000 tercapai hingga 2025, banyak melibatkan perempuan.

Dalam rangka identifikasi, sinergi, dan kolaborasi berbagai program kerja dan kebijakan eksisting di pemerintah daerah yang mendukung peran perempuan dalam perekonomian dan juga upaya memperkuat implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG), telah dilaksanakan identifikasi dan koordinasi untuk menggali praktik-praktik baik dan pembelajaran pada pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan PUG secara efektif. Komponen utama program PUG di daerah yang ditinjau terkait kelembagaan PUG, penyusunan data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, peningkatan kapasitas SDM, dan monitoring dan evaluasi. Pemilihan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian konkret dan pengakuan nasional atas keberhasilan dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun di daerah yang telah meraih penghargaan tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 kategori "Mentor", yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, serta menjadi bukti nyata keberhasilan mereka dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Guna mempercepat proses internalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) bagi K/L, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis bagi K/L Penggerak dan K/L Pengampu di 5 sektor Pembangunan. Kementerian Koordinator termasuk dalam K/L pengampu sektor ekonomi. Dalam mendukung PUG sektor ekonomi, terdapat 5 indikator yang dapat didorong antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, pengeluaran perkapita laki-laki dan perempuan, dan indeks literasi keuangan. Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dan unit kerja yang menangani terkait TPAK Perempuan, penyaluran KUR, keuangan inklusi, dan ekonomi digital. Dengan diadakannya bimbingan teknis dan sosialisasi diharapkan penyelenggaraan PUG di

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat segera terlaksana dan dapat mengikuti penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya di tahun depan.

Hingga triwulan IV Tahun 2025, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.
- Melaksanakan FGD Penghitungan Indikator Tematik RPJMN 2025-2029, salah satunya indikator Pengeluaran Perkapita
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam kaitannya dengan perspektif gender dan Pokja Care Economy.
- Melakukan identifikasi, sinergi, dan kolaborasi berbagai program kerja dan kebijakan eksisting di kementerian/lembaga yang mendukung peran perempuan dalam perekonomian seperti KemenPPPA, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan OJK.
- Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor informal dan mengurangi gap kesenjangan gender dalam penghasilan dan kesempatan kerja.
- Melakukan koordinasi dengan KemenPPPA terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kemenko Perekonomian, khususnya terkait mekanisme tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) pada rincian output (RO) potensial.
- Melaksanakan kegiatan *benchmarking* program pembangunan responsif gender di berbagai pemerintah daerah dalam rangka penguatan partisipasi ekonomi perempuan guna mendukung pencapaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan. Daerah yang menjadi lokasi pembelajaran meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kota Sawahlunto, Kota Surakarta.
- Menghadiri kegiatan advokasi, bimbingan teknis, pendalaman, serta identifikasi rincian output responsif gender dalam percepatan PUG bagi kementerian/lembaga penggerak dan pengampu 5 sektor pembangunan prioritas.

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024. Hal ini dikarenakan indikator kinerja utama Persentase Penyelesaian Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya. Adanya proses koordinasi yang intens dalam pelaksanaan rencana aksi, maka diprediksi penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Pemantauan dan evaluasi implementasi PPLP di KL terkait dan daerah	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Benchmarking Program Pembangunan Responsif Gender di Daerah dalam implementasi penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian di beberapa wilayah antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya pada 25 September 2025 • Provinsi Jawa Tengah pada 30 September 2025 • Kota Semarang pada 1 Oktober 2025 • Kota Surakarta pada 23 Oktober 2025 • Kota Denpasar pada 29 Oktober 2025 • Kabupaten Gianyar pada 30 Oktober 2025 • Kota Sawahlunto pada 4 November 2025 - Telah dilaksanakan Advokasi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Pengampu 5 Sektor Pembangunan pada 4 November 2025. - Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis

			<p>Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi Kementerian/Lembaga Penggerak dan Pengampu di 5 Sektor Pembangunan pada 18-19 November 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Rapat Internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada 24 November 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Uji Coba Modal PUG dengan KemenPPPA pada tanggal 3 Desember 2025. - Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk Persiapan Evaluasi PUG 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) untuk Kementerian/Lembaga pada 16 Desember 2025. - Telah dilaksanakan Uji Coba Kerentanan Aplikasi Evaluasi PUG dan Informasi User Password serta Jadwal Pelaksanaan Evaluasi PUG Tahun 2024-2025 pada 24 Desember 2025.
2	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PPLP	Terlaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Rapat Internalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada 24 November 2025 - Telah disusun laporan hasil benchmarking Program Pembangunan Responsif Gender di Daerah dalam implementasi penguatan partisipasi perempuan dalam perekonomian

			- Telah disusun konsep Pedoman Pengarusutamaan Gender Kemenko Perekonomian.
--	--	--	---

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Menghadiri Advokasi Ekonomi Perawatan untuk Peningkatan TPAK Perempuan pada 24 Oktober 2025.
2. Menghadiri Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan pada 31 Oktober 2025.
3. Menghadiri Peluncuran Buku Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 pada 19 November 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Sebagai contoh jumlah anggaran yang diefisiensikan sebesar Rp.47.540.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu adanya perubahan SOTK dan reorganisasi unit kerja pada Kementerian/lembaga terkait sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan unit kerja yang mengampu program kerja yang berkaitan dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan

3

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**1.1 Persentase
Rekomendasi
Kebijakan Lintas
Sektor yang
Ditindaklanjuti**

Latar Belakang

Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dimanfaatkan dalam bentuk naskah kedinasan dan/karya tulis ilmiah yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan dalam bentuk disposisi pemanfaatan yaitu meliputi :

- Penggunaan dalam penyusunan bahan koordinasi internal, lintas sektor, maupun tingkat nasional;
- Penggunaan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
- Penggunaan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan outcome, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025 adalah:

- Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Bidang Perekonomian dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga.
- Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antardaerah, antarwilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terselesaikan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 90%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada tahap pertama: Identifikasi dan Sinkronisasi Isu/Permasalahan terkait Tingkat Input Material Sirkular hingga Triwulan III tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-3.1				
3.1. Rekomendasi Kebijakan Lintas	%	90	90	100%

Sektor yang Dimanfaatkan

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan IV Tahun 2025 telah tercapai sebesar 90%. Persentase rekomendasi kebijakan lintas sektor yang ditindaklanjuti baru dapat diketahui nilainya pada akhir tahun.

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Ekonomi Syariah**

Potensi ekonomi syariah dapat dioptimalkan dengan ekosistem halal yang terintegrasi baik dari sisi keuangan syariah, industri halal, keuangan dan sosial syariah. Cakupan ekonomi syariah dilakukan pendekatan dengan 2 (dua) metode yaitu pendekatan dari sisi sektor riil dan dari sisi keuangan. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2025 – 2029 menargetkan penguatan rantai nilai halal dan platform digital. salah satunya tercermin pada produk halal, sehingga di era sekarang bukan sebagai isu syariah, tetapi sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) sehingga semua kalangan masyarakat dapat memilih menggunakan produk tanpa memandang agama. Produk halal ini menjamur pada berbagai kehidupan masyarakat, bukan hanya pada produk makan dan minum, tetapi berkembang pada produk-produk lainnya seperti obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata, investasi, dan lain-lain. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan koordinasi antar sektor seperti BPJPH, Kementerian Perindustrian dan KNEKS. Terkait dengan digitalisasi, saat ini mulai berkembang platform sertifikasi halal online dan *marketplace* halal. Akan tetapi, masih memerlukan regulasi yang mendukung keamanan siber dan kepatuhan syariah. Kolaborasi lintas sektor dan kerja sama internasional, seperti dengan Islamic Development Bank (IsDB) diperlukan untuk membangun ekosistem halal yang kokoh.

Pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah hingga triwulan IV tahun 2025, disampaikan sebagai berikut:

- Biro MKKS mengawal kolaborasi antara BPJPH dengan Kementerian Agama, dengan pemisahan umum di Kementerian Agama dan peraturan Khusus di BPJPH.
- Mengawal pembahasan rancangan Per-BPJPH tentang Tata Niaga Impor Produk Halal sebagai dasar penyusunan Surat Kesesuaian Kehalalan (SKK) yang perlu ditindaklanjuti lebih detail kembali dalam ketentuan regulasi kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Monitoring implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 sebagai tindak lanjut kejelasan wewenang tugas fungsi ekonomi syariah yang di-lead oleh KNEKS dan OJK untuk dikoordinasikan isu dan program kerja dengan kementerian/lembaga terkait.
- Melakukan pemetaan awal dalam deep analysis terkait dengan industri halal

- Mengawal perumusan SKB MEKSI 2025-2029 yang akan digunakan sebagai dasar hukum kerja bersama kementerian/lembaga terkait implementasi masterplan ekonomi syariah di Indonesia.
- Memberikan tanggapan/masukan atas dokumen MEKSI 2025-2029 kepada KNEKS sebagai upaya penyempurnaan dokumen masterplan tersebut.
- Menyiapkan bahan paparan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar *the Indonesian Association of Islamic Economists* (IAEI).
- Menyiapkan bahan paparan *Talkshow Economic Challenges Special Ramadan* AmCham Indonesia Breakfasting Forum: Strategic Collaboration for Effective Halal Certification Implementation yang diselenggarakan oleh *Indonesian Association of Islamic Economists* (IAEI) dan Metro TV
- Menyiapkan bahan Paparan Arah Kebijakan Penguatan Ekonomi Islam di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian dalam acara Sarasehan Ekonom Islam Indonesia
- Monitoring implementasi *launching State of the Global Islamic Economy* (SGIE) report 2024/2025 sebagai laporan tahunan yang mengukur perkembangan dan potensi ekonomi syariah global di berbagai sektor yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L terkait
- Mengawal pembahasan payung hukum Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) melalui rencana penyusunan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.
- Koordinasi Tindak Lanjut Pertemuan Pertama Dewan Koordinasi Tertinggi RI – Arab Saudi saat Kunjungan Presiden RI sebagai pemrakarsa yakni Kementerian Luar Negeri yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral melalui inisiatif strategis di berbagai bidang. Rapat ini membahas struktur organisasi DKT, tugas dan fungsi setiap level, inisiatif yang diusulkan, mekanisme kerja, serta tindakan lanjutan menuju pertemuan DKT berikutnya pada tahun 2027 di Indonesia
- *Knowledge Sharing* forum konsultasi publik standar pelayanan permohonan data dan informasi Jaminan Produk Halal melalui rancangan Keputusan Kepala Badan PBJPH sebagai dasar berbagi penggunaan data.
- Berpartisipasi pada *Halal International Workshop "Strategic International Partnership to Promote Halal Economy for Sustainable Economic Development"* di Bangkok, Thailand.
- Koordinasi pembahasan Pleno Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029.
- Biro MKKS mengawal rapat koordinasi Isu Kehalalan Food Tray pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menyiapkan bahan paparan rangkuman Laporan SGIE report 2024/2025 untuk Bapak Sekretaris Kementerian sebagai update ekonomi islam global terkini.
- Menyiapkan bahan paparan Focus Group Discussion (FGD) Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada acara Bank Indonesia (BI).

- Menyiapkan bahan paparan Brief Sheet Ekonomi Syariah untuk Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.
- Menyiapkan bahan paparan membangun ekosistem ekonomi islam menuju Indonesia pusat ekonomi islam dunia untuk Menko Perekonomian.
- Menyusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian.
- Menjadi narasumber dalam FGD Perkembangan Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada 16 Desember 2025.

- **Indonesia National Single Window (INSW)**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window (INSW) dan untuk memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga yang terintegrasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Semester 1 Tahun 2025 pada 2 Juli 2025 dan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Semester II Tahun 2025 pada 15 Desember 2025 oleh LNSW dan bekerja sama dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama. Rapat koordinasi tersebut merupakan Rapat Tingkat Eselon I dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beberapa isu strategis tahun 2024 yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh INSW antara lain: pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), kode pelabuhan, Indonesia Single Risk Management (ISRM), Business Continuity Management System (BCMS), tata kelola pertukaran data, kanal komunikasi bersama, integrasi Single Submission Ekspor dengan e-SKA, posisi INSW pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan konsep RPerpres Logistik, mandatory sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penambahan ruang lingkup Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), identifikasi dual use items, integrasi SIMIRAH ke INATRADE dan SINSW dengan adopsi mekanisme SIMBARA, serta peningkatan keamanan sistem menanggulangi terjadinya *cyber-attack*.

Untuk tahun 2025, isu yang dapat diselesaikan pada semester I antara lain penguatan manajemen risiko melalui Indonesia *Single Risk Management* (ISRM), penyesuaian kebijakan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, layanan perizinan dalam satu aplikasi/*Single Submission*, serta rencana perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW. Selanjutnya, lima usulan lima isu strategis untuk dapat dicapai pada 2026. Kegiatan strategis tersebut yaitu penyesuaian regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia *Single Risk Management* (ISRM) serta mekanisme pengawasan *Strategic Trade Management* (STM).

Hingga triwulan IV Tahun 2025, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan INSW, disampaikan sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian
- Telah dilaksanakan pembahasan capaian dan evaluasi isu strategis tahun 2024 dan usulan isu strategis tahun 2025. Selain itu, juga dilakukan pembahasan terkait dengan ketentuan pasal 19 Perpres No 44 Tahun 2018.
- Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada 2 Juli 2025
- Rapat Pembahasan Kode Simpul Transportasi Nasional dan Kode Pelabuhan Perikanan atas tindak lanjut penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kode Simpul Transportasi Nasional.
- Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Courtesy Visit dan Technical Workshop STM terkait dengan identifikasi HS code untuk barang-barang dual use item, konse pola pengawasan dan perizinan, dan pembahasan terkait kesisteman pada 29 Juli 2025.
- Sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Dewan Pengarah, telah dilaksanakan Rapat Teknis Unit Layanan Single Window (ULSW) pada 11 Agustus 2025.
- Telah dilaksanakan penyusunan rancangan Kepmenko tentang perubahan atau penambahan anggota LNSW karena adanya perubahan nomenklatur kementerian/lembaga yang terkait dengan ekspor, impor, dan logistik.

Proyeksi triwulan IV tahun 2025 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang intens sehingga diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi kebijakan lintas sektor	Terlaksana	Ekonomi Syariah Sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan: - Telah disusun bahan paparan Brief Sheet Ekonomi Syariah untuk Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya

			<p>Saing Ekonomi pada 20 November 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah disusun bahan paparan membangun ekosistem ekonomi islam menuju Indonesia pusat ekonomi islam dunia untuk Menko Perekonomian pada tanggal 24 November 2025. - Telah disusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian pada tanggal 4 Desember 2025. - Menjadi narasumber dalam FGD Perkembangan Implementasi Kebijakan Jaminan Produk Halal pada 16 Desember 2025 <p>Melanjutkan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan ekonomi syariah yang terlaksana dari triwulan I hingga III, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan Wacana Revisi PP 42 Tahun 2024 pada 14 Januari 2025. - Kick-off Pembahasan Awal Rancangan Per-BPJP tentang Tata Niaga Impor Produk Halal pada 18 Februari 2025. - FGD Hasil Monitoring Implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 (OJK) pada 20 – 21 Februari 2025.
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Pembahasan ULSW Kementerian Pertanian pada 4 Maret 2025. - Rapat Koordinasi Pembahasan Industri Halal (Kajian BRIN) pada 21 April 2025. - Rapat Perumusan SKB MEKSI 2025-2029 (KNEKS) yang dilaksanakan pada 23 Juni 2025. - Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Semester I Tahun 2025 pada 15 Mei 2025 dan 11 Juni 2025. - Launcing <i>State of the Global Islamic Economy (SGIE) report 2024/2025</i> pada 8 Juli 2025. - Rapat Diseminasi dan Serah Terima Kajian KNEKS pada 9 Juli 2025. - Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pertemuan DKT Indonesia – Arab pada 30 Juli 2025. - Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Permohonan Data dan Informasi JPH pada 31 Juli 2025. - Rapat Pleno Harmonisasi atas Rancangan Permen Perindustrian tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal Tahun 2025-2029 pada 28 Agustus 2025. - Rapat Koordinasi Food Tray MBG pada 26 September 2025. <p>INSW</p>
--	--	--	---

		<p>Sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penambahan Anggota Dewan Pengarah INSW pada 15 Oktober 2025 dan Rapat Penetapan Anggota Baru Dewan Pengarah INSW dan Percepatan Penetapan ULSW pada 24 Oktober 2025. - Telah dilaksanakan Breakfast Meeting Persiapan Rapat Dewan Pengarah INSW Semester 2 pada 5 dan 11 Desember 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Semester II Tahun 2025 pada 15 Desember 2025. <p>Melanjutkan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan terkait INSW yang terlaksana dari triwulan I hingga III, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan pembahasan Unit Layanan Single Window (ULSW) Kementerian Pertanian. - Telah dilaksanakan pembahasan capaian dan evaluasi isu strategis tahun 2024 dan usulan isu strategis tahun 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Semester I Tahun 2025 pada 15 Mei 2025 dan 11 Juni 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW
--	--	--

			<p>Tingkat Eselon I yang dilaksanakan pada 2 Juli 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Kode Simpul Transportasi Nasional dan Kode Pelabuhan Perikanan pada 22 Juli 2025. - Telah dilaksanakan Rapat Teknis Unit Layanan Single Window (ULSW) pada 11 Agustus 2025. - Telah dilaksanakan penyusunan rancangan Kepmenko tentang perubahan atau penambahan anggota INSW.
2	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian dalam bentuk naskah kedinasan dan karya tulis ilmiah	Terlaksana	Terlaksananya penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian lintas sektoral

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Menghadiri pembahasan Survei Studi Nasional UNESCAP-IsDB pada 23 Oktober 2025.
- Menyusun bahan paparan Brief Sheet Ekonomi Syariah untuk Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi pada 20 November 2025.
- Menyusun bahan paparan membangun ekosistem ekonomi islam menuju Indonesia pusat ekonomi islam dunia untuk Menko Perekonomian pada tanggal 24 November 2025.
- Menyusun bahan paparan summary laporan kinerja ekonomi dan keuangan syariah triwulan III tahun 2025 untuk Menko Perekonomian pada tanggal 4 Desember 2025.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.54.876.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

- Belum diimplementasikannya secara maksimal regulasi dari PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Jaminan Produk Halal.
- Adanya perubahan tugas dan fungsi unit kerja di setiap kementerian/lembaga karena adanya perubahan SOTK.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap K/L terkait.
- Perlu adanya pembaharuan kelembagaan INSW karena perubahan tugas dan fungsi unit kerja di setiap kementerian/lembaga.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 4: Terselenggaranya Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran
3. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja
4. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan
5. Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan agenda pembangunan lima tahunan, Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Strategis K/L yang kemudian disebut Renstra K/L yang mengakomodasi rencana-rencana strategis jangka menengah pada tingkat K/L yang akan mendukung agenda RPJMN. Setiap tahun Menteri/Kepala Lembaga menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan serta mengacu pada program kerja K/L tahun selanjutnya. Rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan disebut juga Siklus Perencanaan dan Penganggaran yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, K/L mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang berisi tentang petunjuk dan tata cara penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan program dan anggaran yang berwujud dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Petunjuk teknis dari penyusunan dokumen perencanaan juga mengacu dan berpedoman pada Perdirjen Anggaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Baik Renja maupun RKA K/L merupakan produk perencanaan yang dihasilkan dari siklus tahunan (berulang setiap tahunnya).

Selain perencanaan tahunan, dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan penyesuaian dokumen perencanaan pada tahun berjalan yang tertuang pada dokumen POK dan Revisi DIPA. Perubahan pada dokumen POK dan Revisi DIPA merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan unit kerja terhadap rencana pelaksanaan program dan anggarannya. Penyesuaian tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui mekanisme revisi anggaran dan/atau revisi informasi kinerja pada dokumen perencanaan. Revisi anggaran akan mengacu pada PMK Nomor 107 tahun 2024 sedangkan penyesuaian Renja K/L akan mengacu pada Permen PPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L.

Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja merupakan ukuran dalam mengintegrasikan dokumen tata kelola pemerintahan secara lebih strategis. Proses ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan program, penganggaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan yang diambil oleh kementerian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan IV tahun 2025 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran, dan Kinerja sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.1				
4.1.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja	%	100	100	100%*

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan IV tahun 2025 telah tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Program, Anggaran dan Kinerja			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Terlaksana	Telah dilakukan analisis atas setiap usulan tambahan anggaran /permintaan

	pelaksanaan rencana aksi		pembiayaan selama triwulan IV.
2	Monitoring capaian rincian output.	Terlaksana	Telah dilakukan pelaporan Indikator Terkait
3	Evaluasi kualitas perencanaan program, anggaran, dan kinerja	Terlaksana	Hasil evaluasi tercermin dari penilaian IPPN, IKPA, dan LAKIP

Upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Melakukan Sinkronisasi Renja dan RKA K/L TW IV.
2. Melakukan pemutakhiran atas penyusunan Renja 2025
3. Finalisasi RKA-K/L dan Renja TA 2026
4. Penyelenggaraan Rapat Harmonisasi dan Penetapan Rancangan Renstra K/L 2025-2029.
5. Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2025 di lingkup Sekretariat untuk melihat hasil dan kualitas kinerja yang telah dihasilkan pada 2025
6. Penyusunan laporan kinerja triwulan IV tahun 2025
7. Penyusunan laporan kinerja tahun 2025
8. Penyusunan dan permintaan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Melaksanakan rapat koordinasi beberapa unit kerja dalam 1 kesempatan yang sama
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau *workshop*
4. Pengumpulan dan *sharing* data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive)

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.17.232.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu Dengan adanya kebijakan efisiensi 2025 yang berlanjut di 2026 menyebabkan tertundanya penetapan DIPA 2026 diawal bulan Desember. Upaya perbaikan atas kendala yang dihadapi adalah Melakukan percepatan penyesuaian perencanaan dan penganggaran melalui penajaman prioritas kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif setelah DIPA ditetapkan.

4.2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan

Latar Belakang

Dokumen Program dan Anggaran terdiri dari Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja K/L, RKA-K/L dan DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Petunjuk

Program dan Anggaran

Operasional Kegiatan (POK), Laporan Hibah, Rencana Penarikan Dana). Dalam rangka mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan agenda pembangunan lima tahunan, K/L menyusun Rencana Strategis K/L yang kemudian disebut Renstra K/L yang mengakomodasi rencana-rencana strategis jangka menengah pada tingkat K/L yang akan mendukung agenda RPJMN. Setiap tahun Menteri/Kepala Lembaga menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan serta mengacu pada program kerja K/L tahun selanjutnya. Rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan disebut juga Siklus Perencanaan dan Penganggaran yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Penyusunan Renstra K/L sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, K/L mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RKA-KL dan DIPA yang berisi tentang petunjuk dan tata cara penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan program dan anggaran yang berwujud dalam dokumen RKA-K/L dan DIPA. Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Petunjuk teknis dari penyusunan dokumen perencanaan juga mengacu dan berpedoman pada Perdirjen Anggaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Penyusunan Rencana dan Program ini meliputi perencanaan program, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan dan penyesuaian program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya perencanaan yang disusun ini akan menjadi keluaran berupa dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L). Baik Renja maupun RKA K/L merupakan produk perencanaan yang dihasilkan dari siklus tahunan (berulang setiap tahunnya).

Selain perencanaan tahunan, dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan penyesuaian dokumen perencanaan pada tahun berjalan yang tertuang pada dokumen POK dan Revisi DIPA. Perubahan pada dokumen POK dan Revisi DIPA merupakan hasil dari penyesuaian yang dilakukan unit kerja terhadap rencana pelaksanaan program dan anggarannya. Penyesuaian tersebut kemudian akan ditindaklanjuti melalui mekanisme revisi anggaran dan/atau revisi informasi kinerja pada dokumen perencanaan. Revisi anggaran akan mengacu pada PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sedangkan penyesuaian Renja K/L akan mengacu pada Permen PPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L. Dalam penyesuaian revisi Renja tahun 2025 dokumen yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses

penyelesaian dokumen yang efektif. Proses penyelesaian dikatakan efektif dan berkualitas apabila penyusunan dokumen program dan anggaran terkait layanan perencanaan dan tugas serta fungsi Biro Perencanaan dapat diselesaikan sesuai dengan janji layanan atau tepat pada waktu yang ditetapkan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Kinerja Triwulan IV tahun 2025 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase Penyelesaian Dokumen Program dan Anggaran yang Tepat Waktu sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.2				
4.2. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran				
	%	100	100	100%

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada Triwulan VI tahun 2025 telah tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Menyiapkan penyusunan laporan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada RO PN	Terlaksana	Telah dilakukan pengumpulan laporan capaian atas RO PN tahunan
2	Menyiapkan dokumen pendukung (apabila dibutuhkan) untuk penyesuaian Renja 2026 dan RKA K/L 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran	Terlaksana	Penyusunan dokumen pendukung untuk Renja dan RKA K/L berdsasarkan Pagu Alokasi Anggaran
3	Melakukan penyesuaian pada	Terlaksana	Tambahan anggaran dari Pagu Alokasi Anggaran

	Renja 2026 dan RKA K/L 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran		telah disesuaikan dengan Renja dan RKA K/L 2026
4	Finalisasi konsep RKA K/L dan DIPA TA 2026	Terlaksana	Penelaahan atas RKA K.L dan DIPA 2026 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
5	Menetapkan Renja K/L TA 2026	Terlaksana	Renja TA 2026 ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Melakukan revisi pemutakhiran revisi DIPA pada bulan November di tahun berjalan dan revisi POK maksimal pada tanggal 23 Desember di tahun berjalan	Terlaksana	Revisi POK yang menjadi Kewenangan KPA dan revisi DIPA telah dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya keluaran RO

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah di susun.
2. Mengkoordinasikan penyusunan profil risiko dan petunjuk teknis MRPN LS Topik Pariwisata.
3. Melakukan revisi DIPA dengan tujuan pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan strategis dan/atau prioritas pada Triwulan IV TA. 2025.
4. Revisi Pemutakhiran POK TA 2025.
5. Melakukan pembahasan rincian output baru dan rincian output yang mendukung PN pada tahun 2026.
6. Melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.
7. Koordinasi dengan Mitra Kerja di Bappenas terkait RKP 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Kinerja Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan rapat koordinasi bersama menggunakan via aplikasi Zoom yang dapat menghemat anggaran, pelaksanaan rapat koordinasi yang menggabungkan beberapa agenda.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada periode selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.23.234.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Adanya efisiensi anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 yang berlanjut di 2026.
2. Kebijakan RO khusus direktif presiden yang perlu ditambahkan pada Renja dan DIPA 2026 pasca penetapan DIPA awal 2026.
3. Surat Menteri Keuangan nomor S-666/MK.03/2025 tanggal 21 Oktober 2025, mempercepat batas waktu revisi kewenangan Kementerian Keuangan dan Pemutakhiran POK 2025 yang semula di tanggal 23 menjadi 12 Desember 2025.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yaitu :

1. Melakukan penajaman prioritas program dan kegiatan agar fokus pada pencapaian sasaran strategis dan kinerja utama
2. Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian cepat dokumen perencanaan dan penganggaran melalui mekanisme revisi yang terkoordinasi.
3. Menetapkan timeline internal yang lebih ketat dan melakukan percepatan koordinasi lintas unit kerja.

4.3 Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja

Latar Belakang

Persentase penyelesaian penyelarasan kerja sama dan kinerja merupakan ukuran dalam mengintegrasikan dokumen tata kelola pemerintah secara lebih strategis. Kegiatan ini menghasilkan dokumen :

1. Perjanjian Kinerja (PK)
2. Laporan kinerja triwulanan
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Dokumen bukti dukung
5. *Memorandum of Understanding*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses bisnis terkait tata Kelola kerja sama dan kinerja, untuk dapat memperoleh nilai akhir dari IKU ini adalah dengan membagi antara jumlah dokumen yang diselesaikan dengan jumlah dokumen yang ditetapkan dikali dengan 100%.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan ke IV 2025, nilai realisasi penyelesaian penyelarasan kinerja dan kerja sama dapat disampaikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.3				
4.3.Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja	%	100	100	100%

***nilai dihasilkan di akhir tahun*

Hingga triwulan IV Ta. 2025, seluruh dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja dikumpulkan ke dalam aplikasi website <https://kinerja.ekon.go.id> dan juga

ditempatkan di penyimpanan bersama berbasis Cloud (Gdrive). Dokumen yang telah dihasilkan meliputi :

- Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan tertentu. Dokumen ini berisi indikator kinerja dan target yang harus dicapai dalam periode satu tahun. Secara umum, dokumen PK terdiri atas:

1. Pernyataan perjanjian pihak pertama (pemilik PK) kepada pihak kedua (atasan pemilik PK) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan yang telah direncanakan selama satu periode;
2. Lampiran PK yang berisi sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target yang harus dicapai oleh masing-masing jabatan, baik menteri, pejabat eselon I, maupun pejabat eselon II;
3. Rencana aksi setiap kegiatan yang mencakup tahapan pelaksanaan dalam satu tahun, dibagi ke dalam periode triwulan beserta inisiatif strategis yang mendukungnya.

Penyusunan dan penetapan PK dilakukan setiap tahun sekali di seluruh tingkatan jabatan, mulai dari Menteri, Eselon I, Eselon II, hingga pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penetapan PK dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran ditetapkan dan disahkan. Dokumen perjanjian kinerja 2025 yang meliputi lampiran perjanjian, manual iku dan rencana aksi dapat diunggah pada link

<https://drive.google.com/drive/folders/1FaFqm0zmCISzzXtc7U9G6N8hI8EArmtg?usp=sharing>

- Laporan Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV

Pelaporan kinerja merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program dan pencapaian target. Setiap satuan kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja triwulanan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan rencana aksi, penggunaan anggaran, serta capaian output (khususnya bagi unit kerja Eselon II).

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I, II, dan III dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja. ND permintaan triwulan I, II, III, dan IV tercantum pada ND tentang permintaan penyusunan narasi kinerja. Melalui laporan kinerja ini, dapat diketahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tercapai pada periode Januari s.d Maret, April s.d Juni, Juli s.d September dan Oktober s.d Desember. Laporan Kinerja dapat dilihat pada website link www.kinerja.ekon.go.id

- Dokumen Bukti Dukung Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja menjadi momentum unit kerja untuk mengelola dan mengumpulkan bukti dukung capaian kinerja. Bukti dukung yang relevan di dokumentasikan didalam system informasi www.kinerja.ekon.go.id

Adapun kerjasama yang menghasilkan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada TW IV 2025 yaitu :

1. Menghadiri Rapat Pembahasan Lanjutan Draft Implementing Arrangement (IA) mengenai Platform Reutilization yang dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Minyak dan Gas Bumi
2. Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Keppres Panitia Nasional Penyelenggaraan KTT ke-12 D-8 yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri
3. Menghadiri Focus Group Discussion The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral selaku Anggota Sekretariat Tim Nasional OECD

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Penyelarasan Kerja Sama dan Kinerja			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Monitoring ketercapaian NKO Perjanjian Kinerja tahun 2025 triwulan IV	Terlaksana	Hingga triwulan IV ini telah terlaksana monitoring Nilai Kinerja Organisasi setiap unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2025 yang telah ditetapkan
2	Penetapan konsep draf laporan kinerja triwulan IV dan laporan tahun 2025	Terlaksana	Telah menetapkan dan mensosialisasikan konsep laporan kinerja triwulanan IV dan LAKIP Eselon I di setiap unit kerja
3	Evaluasi ketepatan dokumen pelaksanaan laporan kinerja triwulan IV	Terlaksana	Telah melaksanakan reviu ketepatan laporan yang telah disusun dan disampaikan
4	Koordinasi antar unit kerja dalam penguatan kerja sama dan kinerja	Terlaksana	Telah melaksanakan koordinasi FGD antar unit kerja dalam rangka penguatan kinerja dan melaksanakan fasilitasi coaching clinic kepada para unit kerja yang membutuhkan
5	Monitoring pelaksanaan kinerja	Terlaksana	Telah melaksanakan monitoring pelaksanaan

	dan kerja sama yang dilaksanakan oleh unit kerja		kinerja dan kerja sama antar unit kerja
6	Evaluasi efektivitas koordinasi penguatan kerja sama dan kinerja	Terlaksana	Telah melaksanakan evaluasi efektivitas pelaksanaan kinerja dan kerja sama

Upaya nyata dalam kegiatan – kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Pelaksanaan Kickoff Meeting evaluasi AKIP Kementerian 2025
2. Pemberitahuan unit kerja melalui ND permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV
3. Melaksanakan reviu atas laporan kinerja yang telah disampaikan oleh unit – unit kerja, agar sesuai dengan pedoman teknis pelaporan kinerja
4. Pelaksanaan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian
5. Pelaksanaan penyusunan matriks tindaklanjut atas penyusunan indikator kinerja tahun 2025
6. Meningkatkan ukuran ruang penyimpanan atas dokumen data dukung pelaksanaan kinerja yang terselesaikan
7. Menyusun draft konsep kinerja dan mensosialisasikan kepada PIC unit kerja agar dapat meningkatkan pemahaman dalam menyusun kinerja
8. Menyusun Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja TW IV
9. Melaksanakan koordinasi eksternal dengan Kementerian/Lembaga terkait harmonisasi dan koordinasi isu-isu terkait
10. Melaksanakan rapat pimpinan dalam mengevaluasi kinerja tahun 2025 dan menerapkan program penting arahan presiden langsung yang akan dibawa pada Kinerja 2026
11. Melaksanakan sosialisasi dan permintaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025
12. Melaksanakan rapat bersama dengan seluruh unit kerja untuk penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan rapat koordinasi bersama menggunakan via aplikasi zoom yang dapat menghemat anggaran. Kemudian penggunaan kembali, dan peremajaan kembali fasilitas ruang rapat kantor agar dapat digunakan kapan pun untuk rapat dan penggunaan media penyimpanan berbasis Cloud. Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.53.923.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

**4.4 Persentase
Penyelesaian Standar
Kebijakan**

Latar Belakang

Persentase penyelesaian standar keluaran kebijakan merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen standarisasi keluaran kebijakan. Dokumen standar keluaran kebijakan ini merupakan sebuah dokumen berbentuk pedoman dan/atau produk hukum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penerapan standarisasi keluaran kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tiap unit kerja.

Tahapan penyusunan standar keluaran kebijakan:

- a. pengumpulan data,
- b. penyusunan rancangan standar keluaran kebijakan,
- c. pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan,
- d. penyusunan dokumen pedoman standar keluaran kebijakan, dan
- e. diseminasi/sosialisasi penerapan standarisasi keluaran kebijakan.

Keluaran/output yang dihasilkan/ditargetkan:

1. Data dan Undangan rapat serta daftar hadir
2. Notula/Risalah/Berita Acara
3. Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf
4. Draft dokumen pedoman standar keluaran kebijakan
5. Dokumen Pedoman Standar keluaran kebijakan

Rumus Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan:

$$\% \text{Penyelesaian Standar Kebijakan} = \frac{\text{Jumlah Tahapan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Output yang Ditargetkan}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan telah terealisasi sebesar 100%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah melaksanakan seluruh tahapan, dimulai dari tahap (1) pengumpulan data; (2) penyusunan rancangan/draft standar keluaran kebijakan; (3) pembahasan rancangan standar keluaran kebijakan; (4) penyusunan draft dokumen pedoman standar keluaran kebijakan; dan (5) diseminasi/sosialisasi dan konsultasi pedoman standar keluaran kebijakan. Berikut ringkasan realisasi kinerja pada triwulan IV 2025:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.4				
4.4. Pesentase Penyelesaian Standar Kebijakan	%	100%	100%	100%

Adapun rangkaian kegiatan penyusunan pedoman selama Triwulan IV tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan kajian dasar hukum terkait (UU; Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri) sehingga penyusunan Pedoman Standar Keluaran Kebijakan selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan kaidah dalam peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan kajian literatur terkait peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi dan sektor publik, diantaranya New Public Management (NPM), Public Value Management, Network Approach, Teori Birokrasi Max Weber, Ekonomi Kelembagaan dan Pendekatan Organisasi dan Tata Kelola (*Principal-Agent Theory*).
- Penyusunan alur kerja dan identifikasi tahapan dan jenis keluaran pada setiap jenjang, mendorong alur kerja mencerminkan efisiensi, akuntabilitas, dan keterukuran kinerja.
- Pelaksanaan analisis untuk memastikan penguatan kinerja melalui Standar Keluaran Kebijakan selaras dengan Reformasi Birokrasi dan penilaian Indeks Keluaran Kebijakan, meningkatkan nilai tambah bagi organisasi.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu penerapan standardisasi keluaran kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Dalam rangka pemutakhiran keluaran kebijakan dan perbaikan tata kelola diperlukan penyusunan standar keluaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja penyusunan kebijakan, menyajikan capaian penyelesaian Standar Keluaran Kebijakan sesuai target yang ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan serta merumuskan tindak lanjut perbaikan. Kinerja dalam penyelesaian Standar Kebijakan pada triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan dalam Penyelesaian Draft Pedoman Standar Keluaran Kebijakan dan Pelaksanaan Sosialisasi dan Penjaringan Masukan terhadap rancangan Pedoman.

Berdasarkan rangkaian kegiatan, telah dihimpun masukan baik secara substantif maupun konseptual tata kelola untuk mendukung muatan terhadap rancangan Pedoman dan proses penyempurnaan, diantaranya meliputi:

- Kesesuaian jenis keluaran berdasarkan jenjang dengan memastikan proporsionalitas kewenangan dan tingkat kompleksitas analisis.
- Penajaman diferensiasi antara keluaran kinerja (a.l laporan dan deliverables) dan keluaran kebijakan (a.l rekomendasi kebijakan dan produk hukum);
- Pengintegrasian mekanisme evaluasi kinerja dan umpan balik formal secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan tujuan utama dalam hal antisipasi intervensi course correction jika diperlukan.
- Penyelarasan kriteria penilaian mengadopsi 8 (delapan) kriteria penilaian hasil keluaran JFAK oleh LAN.
- Penguatan tata kelola kebijakan pada tahap analisis ex-ante sesuai kerangka OECD RIA untuk pengambilan kebijakan.
- Masukan atas pentingnya dan pengintegrasian dengan wadah yang berperan dalam knowledge management agar hasil kerja menjadi aset instansi yang dapat diakses, digunakan, dan dipelajari seluruh unit secara berkelanjutan.
- Pemetaan proses kerja di tingkat Pokja memastikan kontribusi anggota proporsional dengan tanggung jawab dan mendorong akuntabilitas individu dan nilai kolaboratif.

- Mengintegrasikan penilaian kinerja melalui hasil kinerja dengan nilai dampak dan/atau kebermanfaatannya (penciptaan nilai publik).

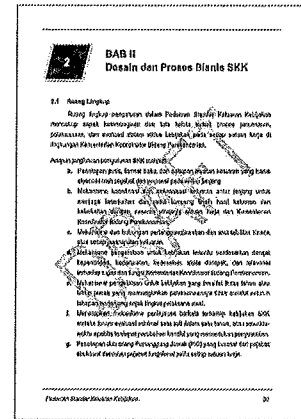
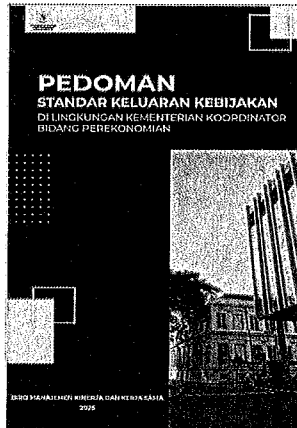
Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase Penyelesaian Standar Kebijakan			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Harmonisasi produk hukum standar keluaran kebijakan	Terlaksana	Telah dilakukan harmonisasi pedoman terkait standar keluaran kebijakan dan penyusunan naskah urgensi penyusunan Permenko terkait standar keluaran kebijakan.
2	Sosialisasi penerapan standar keluaran kebijakan	Terlaksana	Telah dilaksanakan sosialisasi dan konsultasi penjangkaran masukan atas Draft Pedoman Standar Keluaran Kebijakan pada 27 November 2025.

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

- Telah dilakukan pengumpulan data melalui benchmarking dengan peraturan Standar Kebijakan pada Kementerian/Lembaga lain yang sudah terimplementasi dengan baik dan melakukan identifikasi keluaran kebijakan yang sudah diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Telah dilakukan penyalarsan pedoman standar keluaran kebijakan dengan pokok-pokok untuk menunjang pencapaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Indeks Kualitas Kebijakan
- Telah dilakukan penyalarsan keterkaitan Pedoman SKK dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar penyusunan.
- Telah dilakukan pembahasan draft/rancangan standar keluaran kebijakan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Penyusunan draft standar keluaran kebijakan dan Notula Rapat



- Telah dilakukan konsultasi internal dan eksternal untuk memperkaya substansi pedoman, menerapkan nilai partisipatif pemangku kepentingan dan akuntabilitas proses.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.38.346.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada triwulan IV tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain; (1) Koordinasi lintas unit membutuhkan waktu lebih lama dari rencana; (2) Keterbatasan sistem knowledge management dan mekanisme lintas unit yang belum optimal membatasi akses terhadap berbagai data dan bukti pendukung; (3) terdapat perubahan prioritas kebijakan nasional di tengah periode pelaksanaan

Berdasarkan kendala tersebut dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Dialog kinerja perlu dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tepat waktu dan tepat sasaran sehingga berjalan optimal
- Memperkuat mekanisme koordinasi lintas unit untuk menyamakan persepsi mengenai jenis keluaran, alur kerja, dan mekanisme pengukuran, serta menetapkan *timeline* dan PIC terkait pada setiap penyusunan dan penerapan pedoman berjalan lebih efektif dan efisien.
- Melakukan finalisasi rancangan pedoman berdasarkan hasil uji substansi dengan akademisi, praktisi, dan unit kerja terkait.
- Menyelaraskan terminologi, indikator, dan struktur pedoman agar lebih operasional dan mudah diterapkan di seluruh unit

4.5 Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi

Latar Belakang

Salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah pelaksanaan penataan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini sejalan dengan implementasi Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka menuju *Good Governance* dimana semangatnya adalah untuk menjamin transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sejalan dengan reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mencapai *Good Governance* melalui konsep e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah bentuk transformasi proses yang harus terwujud dalam organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu peranan sistem informasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Menyadari pentingnya peranan TIK dalam sistem pemerintahan dan didorong dengan pesatnya perkembangan TIK pada era digital informasi dewasa ini, maka dukungan infrastruktur TIK, pengebangan perangkat lunak serta keamanan informasi yang baik sangat mutlak diperlukan. Ditunjang dengan pengelolaan dan perencanaan kebutuhan TIK yang baik, diharapkan dapat menunjang operasional TIK dalam rangka menunjang bisnis proses institusi secara keseluruhan

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga akhir Triwulan IV tahun 2025 nilai realisasi pengukuran aktivitas IKU Persentase penyelesaian penataan data dan sistem informasi sebesar 100%. dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-4.5				
4.5 Persentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi	%	100	100	100%

Berdasarkan kegiatan yang menunjang langsung tercapainya tujuan target yang diharapkan, kegiatan rencana aksi pada triwulan IV tahun 2025 telah tercapai 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. PERSentase Penyelesaian Penataan Data dan Sistem Informasi			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Melakukan evaluasi pemanfaatan data dan sistem informasi	Terlaksana	Telah dilakukan evaluasi pemanfaatan data dan sistem informasi

2	Menyampaikan laporan hasil evaluasi	Terlaksana	Telah disampaikan laporan hasil evaluasi
---	-------------------------------------	------------	--

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Melakukan pembahasan transformasi SPBE menuju Pemdi;
2. Menindaklanjuti laporan celah keamanan pada aplikasi SIVERA;
3. Menindaklanjuti laporan bug pada website ekon;
4. Pembangunan aplikasi monitoring P2SP;
5. Melakukan FGD terkait Arsitektur SPBE;
6. Melakukan pembangunan website SiKawan dan *Learning Management System (LMS)* sesuai hasil evaluasi layanan sistem informasi kepegawaian;
7. Penyediaan data ekspor impor;
8. Penyediaan data potensi desa;
9. Mengikuti pembinaan Statistik Sektoral;
10. Melakukan penarikan dan instalasi CCTV di gedung Ali Wardhana dan Pos;
11. Melakukan migrasi website TPIN;
12. Mengikuti *transfer knowledge* dan *hand over* portal INA-OECD;
13. Melakukan revitalisasi jaringan komputer di lantai basement gedung Ali Wardhana;
14. Melakukan penarikan kabel LAN di lantai 5 gedung Ali Wardhana;
15. Melakukan kegiatan optimalisasi kinerja jaringan Wi-Fi melalui *tuning*, penyusunan denah, serta pemetaan *heatmap*.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Mengurangi jumlah langganan data dengan memaksimalkan fungsi koneksi remote.
2. Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada periode selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.89.000.000

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yakni

1. Terdapat kendala teknis pada kondisi eksisting rak dan kabel jaringan yang rentan sehingga menimbulkan potensi resiko keamanan siber dalam proses revitalisasi jaringan;
2. Terdapat kendala teknis pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Komdigi yang menyebabkan beberapa layanan Kemenko Perekonomian berhenti beroperasi;
3. Pada pembangunan aplikasi sering kali timeline yang ada tidak sepadan dengan bobot pekerjaan dan konsep yang diberikan oleh user belum matang sepenuhnya sehingga menimbulkan banyaknya perubahan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu

1. Melakukan pemeliharaan berkala pada rak jaringan;
2. Aktif melakukan koordinasi dengan tim PDNS Komdigi dan membuat skenario pencadangan pusat data secara mandiri;
3. Meningkatkan koordinasi dengan user saat pembangunan aplikasi.

5

Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 5: Terwujudnya Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama diukur melalui Survei Kepuasan Layanan dengan responden para pejabat dan pegawai diluar Sekretariat Kemenko Perekonomian. Fokus pertanyaan pada Survei Kepuasan adalah jenis layanan yang dilaksanakan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada masing-masing kelompok substansi. Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama merupakan pertanggung jawaban atas seluruh pelaksanaan layanan yang telah diberikan. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek kualitas pelayanan, yaitu:

1. Ketanggapan Layanan (Responsiveness)
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan, atau kebutuhan layanan.
2. Keandalan Layanan (Reliability)
Mengukur sejauh mana layanan diberikan sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.
3. Sarana dan Prasarana Layanan (Tangibles)
Menilai ketersediaan serta kualitas fisik/fasilitas, termasuk tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan.
4. Kepastiat Layanan (Assurance)
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta membangun kepercayaan dan rasa aman.
5. Sikap dalam Layanan (Empathy)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian personal secara ramah, manusiawi, dan sesuai kebutuhan penerima layanan.

Seluruh aspek tersebut dirata-rata untuk dapat menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan, yang dikategorikan dalam 4 (empat) tingkat penilaian:

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan IV tahun 2025, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah Indeks 3.56 atau Sangat Memuaskan, dengan ringkasan table triwulan IV sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	3 dari 4	3	3.52	117,33%

Survei Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama di triwulan IV telah dilaksanakan. Pada triwulan ini, nilai indeks melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 117,33%.

Pelaksanaan survei kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dilakukan secara online melalui tautan yang disebarakan kepada seluruh unit kerja ke deputian. Pelaksanaan survei ini dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Pengukuran survei bertujuan untuk mengukur realisasi layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang diukur melalui 5 (lima) aspek.

Indeks kepuasan layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama diperoleh dari total seluruh layanan nilai indeks layanan Program & Anggaran, layanan Analisis Kebijakan, layanan Data dan Sistem Informasi, dan layanan Fasilitas Penguatan Kinerja yaitu hasil indeks kepuasan menjadi dasar dan pertimbangan dalam peningkatan kualitas layanan.

Pelaksanaan survey dilakukan pada link berikut www.bit.ly/LayananSekre2025

Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Semester I Tahun 2025 adalah 3.53 atau Sangat Puas. Pada semester II, indeks kepuasan layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 3.52 atau Sangat Puas. Nilai layanan dari Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tahun 2025 merupakan agregat dari nilai di Semester I dan II, sehingga nilai layanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama tahun 2025 adalah 3,52 atau Sangat PUAS

Pengukuran dilaksanakan dengan cara menjumlahkan total nilai dari setiap Indikator kemudian dibagi dengan jumlah indikator sehingga diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Indeks Kepuasan Layanan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1	Persiapan Draft Survey Layanan triwulan IV	Terlaksana	Telah menyusun draft survey kepuasan layanan sekretariat tahun 2025
2	Pelaksanaan dan rekapitulasi survey layanan triwulan IV	Terlaksana	Telah melaksanakan rekapitulasi dan merekap hasil dari survey kepuasan layanan Sekretariat 2025
3	Pengolahan data hasil survey layanan Triwulan IV	Terlaksana	Telah mengolah data masuk responden survey kepuasan layanan Sekretariat
4	Penyusunan laporan kepuasan layanan sekretariat	Terlaksana	Telah menyusun laporan kepuasan layanan Sekretariat tahun 2025
5	Tindak lanjut survey periode sebelumnya	Terlaksana	Menindaklanjuti dalam rapat bersama terkait hasil saran dan masukan pada survey sebelumnya

Layanan yang telah diberikan Biro Manajeme Kinerja dan Kerja Sama, meliputi :

1. Layanan koordinasi, asistensi, dan konsultasi terkait kinerja
2. Layanan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi, dan manual iku di lingkup Menteri, Eselon I dan Eselon II
3. Layanan otomatisasi capaian kinerja di lingkungan kementerian ekon
4. Layanan penyesuaian target kinerja dan penyesuaian Rencana aksi pada tahun berjalan
5. Layanan penganggaran
6. Layanan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan
7. Layanan pemanfaatan media penyimpanan bersama
8. Layanan pemeliharaan seluruh website kantor
9. Layanan koordinasi FGD tata kelola kebijakan
10. Layanan koordinasi penggunaan ruang rapat
11. Layanan perbaikan dan peningkatan pengukuran kinerja yang didasarkan pada Hasil Evaluasi Mandiri serta Rekomendasi Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN-RB.;

Upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

1. Zoom Meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian
2. Menyusun SOP sebagai media kepastian proses dan waktu layanan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan sebagai contoh telah dibangun system pengaduan layanan DSI

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.

2. Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
3. Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
4. Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain, jumlah anggaran yang terealisasi mencapai Rp. 7.000.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterbatasan jumlah SDM pada waktu tertentu, dan Tingkat pemahaman SDM terhadap kebijakan atau regulasi yang belum merata
2. Keterbatasan kapasitas infrastruktur sarana dan prasarana layanan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan pengaturan prioritas layanan dan penyesuaian distribusi beban kerja dan meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan dan bimbingan teknis
2. Mengembangkan system layanan terintegrasi yang dibutuhkan oleh unit kerja, untuk pencatatan dan pemantauan permintaan layanan

6

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) Ke 6: Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di Unit Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
2. Nilai AKIP Sekretariat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1 Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level Eselon II mengacu pada implementasi renaksi RB General level Kementerian. Persentase dari pelaksanaan renaksi dihitung dengan cara membandingkan antara total jumlah rencana aksi yang terlaksana dengan total jumlah rencana aksi yang ditetapkan. Pada tahun 2025, Biro MKKS mendukung pelaksanaan RB yang meliputi :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB
3. Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
4. Tingkat Maturitas SPIP
5. Nilai SAKIP
6. Indeks Perencanaan Pembangunan
7. Tingkat Digitalisasi Arsip
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

9. Indeks Tata Kelola Pemerintahan
10. Indeks Sistem Merit
11. Capaian IKU
12. Opini BPK
13. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
14. Survei Penilaian Integritas (SPI)
15. Indeks BerAKHLAK

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan IV tahun 2025, Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama adalah 85% atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Adapun ringkasan pencapaian kinerja persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama secara ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-6.1				
6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	%	85%	85%	100%

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Manajemen Kinerja dan Kerja Sama ditargetkan sebesar 85% pada tahun 2025. Pada triwulan IV, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah terlaksana sebesar 100% dari total rencana aksi yang ditetapkan. Perhitungan persentase didapatkan berdasarkan total kegiatan terlaksana hingga triwulan IV.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB triwulan IV	Terlaksana	Terpenuhinya seluruh bukti dukung rencana aksi RB Biro MKKS di triwulan IV, dapat dilihat pada link data dukung website kinerja Simersi RB General
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Telah menyusun laporan kinerja Triwulan IV sesuai dengan Nota Dinas Permintaan

			Penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
3	Penyusunan draft perjanjian kinerja tahun 2026	Tertunda/Di geser	Penyusunan draft perjanjian kinerja dilaksanakan pada bulan Januari 2026
4	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI TW IV	Terlaksana	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah menerapkan pemanfaatan SRIKANDI secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Monev realisasi anggaran	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran TA 2025
6	Penyusunan RPD	Terlaksana	ND Penyampaian pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada triwulan IV Ta. 2025
7	Implementasi LLAT	Terlaksana	Telah diimplementasikan LLAT
8	Monev pencatatan SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pencatatan SIRUP
9	Pengisian SIRUP	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengisian SIRUP
10	Penyusunan usulan formasi ASN	Terlaksana	Penyusunan usulan formasi ASN pada tahun 2025 telah dilaksanakan
11	Penyusunan bahan LOM triwulan IV	Terlaksana	Telah menyusun rapat evaluasi kinerja Sekretariat tahun 2025 oleh para pimpinan Eselon I dan II
12	Koordinasi hasil rekomendasi BPK	Terlaksana	Telah dilaksanakan audit atas kepatuhan terhadap perundang – undangan dan SPI TA 2025
13	Dukungan Publikasi konten dan penggunaan logo AKHLAK	Terlaksana	Telah tersusunnya laporan dokumentasi BerAKHLAK triwulan IV

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain :

1. Telah dilaksanakan FGD tentang Evaluasi Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Evaluasi SOTK di lingkungan Kemenko Perekonomian
2. Telah aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam persuratan
3. Telah melaksanakan audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dan SPI tahun 2025 pada 27 November 2025. Kegiatan ini hadir oleh auditor, Kelompok Kerja Keuangan, dan para Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenko Perekonomian. Kegiatan ini menyepakati beberapa hal terkait mekanisme penyampaian tanggapan atas hasil temuan BPK
4. Telah dilaksanakan FGD terkait penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di level Es. I (Sekretariat)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Melaksanakan digitalisasi dalam pengolahan akses dan data
2. Menggunakan penyimpanan berbasis CLOUD
3. Koordinasi menggunakan fasilitas *Zoom Meeting*
4. Melaksanakan pelatihan atau *Coaching clinic* dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai
5. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja
6. Melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya. Sebagai contoh anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.18.892.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terdapat perbedaan waktu pelaksanaan rencana aksi RB di triwulan IV karena pelaksanaannya dilakukan pada tahun berikutnya contoh pelaksanaan penyusunan PK 2026

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan yaitu menyusun skala prioritas dan meningkatkan monitoring pelaksanaan renaksi yang telah disusun.

6.2 Nilai AKIP Sekretariat

Latar Belakang

Nilai Evaluasi SAKIP merupakan nilai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini sesuai dengan revisi Permenko No. 08 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pedoman evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP yang meliputi empat komponen dan bobot, yaitu :

- (1) Komponen Perencanaan Kinerja : **30%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (2) Komponen Pengukuran Kinerja : **30%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **6%**; (b) Kualitas : **9 %**; dan (c) Pemanfaatan : **15%**
- (3) Komponen Pelaporan Kinerja : **20%**
Bobot Nilai:
(a) Keberadaan : **4%**; (b) Kualitas : **6%**; dan (c) Pemanfaatan : **10%**
- (4) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : **20%**

Bobot Nilai:

(a) Keberadaan : 4%; (b) Kualitas : 6%; dan (c) Pemanfaatan : 10%

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP internal

- (1) AA (Bobot Nilai 100);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (100%) dalam 5 tahun terakhir
- (2) A (Bobot Nilai 90);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (80 - 100%)
- (3) BB (Bobot Nilai 80);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (60 - <80%)
- (4) B (Bobot Nilai 70);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (45 - <60%)
- (5) CC (Bobot Nilai 60); Cukup
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (30 - <45%)
- (6) C (Bobot Nilai 50);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (15 - <30%)
- (7) D (Bobot Nilai 30);
Jika kualitas sebagaian besar kriteria telah terpenuhi (0 - <15%)
- (8) E (Bobot Nilai 0)
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria

Nilai AKIP Sekretariat ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat. Penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen, yaitu:

Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 82. Penetapan target 2025 didasarkan pada target kenaikan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hingga triwulan IV 2025 nilai SAKIP Sekretariat adalah 78,95. Dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan IV	% Kinerja
IKU-6.2				
6.2. Nilai SAKIP Sekretariat	Nilai	82	78,95	96,28%

Berdasarkan ND No. PW.04.01/195/INS.M.EKON/11/2025 tentang penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Eselon I Sekretariat Kemenko Perekonomian tahun 2025, diperoleh nilai total sebesar 78,95 atau Kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
		2024	2025
1. Perencanaan Kinerja	30%	26,23	26,61
2. Pengukuran Kinerja	30%	23,16	22,40
3. Pelaporan Kinerja	20%	16,78	15,01
4. Evaluasi Internal	20%	14,84	14,93
Total Nilai	100%	81,01	78,95

Berdasarkan tabulasi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pada komponen Percanaan kinerja dan komponen Evaluasi Internal telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena ada penguatan kegiatan :

- Penyusunan matriks IKU Sekretariat yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
- Memperbaiki konsep Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan rekomendasi dari Evaluator.
- Menetapkan Permenko No.19/2022 tentang aturan Teknis Perencanaan Kinerja yang menjadi arah kiblat penyusunan perencanaan
- Menyusun Matriks Peran Hasil yang menggambarkan kesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai pada tiap level jabatan
- Penetapan Surat Keputusan Tim Kerja dan Pohon Kinerja Sekretariat Kemenko Perekonomian yang menggambarkan aktivitas antar bidang atau antar tugas atau fungsi lain yang bersangkutan
- Aktifnya pimpinan dalam perencanaan kinerja melalui dialog kinerja
- Menetapkan Permenko No. 8/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi AKIP dan penetapan SOP No.SOP-01/SES.M.EKON.1/01/2025 tentang SOP evaluasi internal AKIP pada unit kerja Sekretariat
- Penguatan SDM terkait evaluasi kinerja

Berdasarkan tabulasi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dapat dianalisis bahwa pada nilai akhir komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diantisipasi ditahun berikutnya dengan cara melaksanakan penguatan aktivitas :

- Menyusun dan menetapkan kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan data kinerja
- Mempertajam definisi pengukuran pada manual IKU di setiap IKU
- Melengkapi data dukung pada setiap IKU Kebioan Sekretariat
- mengimplementasikan SOP Reward and Punishment
- Hasil pengukuran kinerja dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penyesuaian anggaran
- Melakukan reuiu laporan kinerja pada level Es. I
- Memastikan disetiap IKU memiliki penjelasan upaya nyata dan/atau hambatannya dalam laporan kinerja tahunan
- Memastikan setiap unit kerja kebioan memahami dan peduli atas laporan kinerja tahunan

Sekretariat pada pelaksanaan evaluasi AKIP Internal menduduki nilai peringkat ke 3 dari 6 unit eselon I lainnya. Seluruh unit kerja di LHE 2025 ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya masa transisi RPJMN yang baru.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

IKU. Nilai SAKIP Sekretariat			
No	Rencana Aksi Triwulan IV	Status	Keterangan
1	Evaluasi implementasi tindaklanjut rekomendasi Inspektorat	Terlaksana	Telah diadakan rapat bersama pimpinan membahas LHE Internal Sekretariat dan upaya tindaklanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh evaluator
2	Persiapan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2026	Terlaksana	Telah mengadakan rapat sosialisasi dan FGD terkait penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026 beserta dengan lampirannya
3	Pelaksanaan Laporan Kinerja triwulan IV di lingkungan Sekretariat	Terlaksana	Telah menyusun laporan kinerja triwulan IV sesuai dengan ND permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan IV di lingkungan Sekretariat
4	Monitoring capaian NKO Kebiroan melalui revidu laporan triwulanan kinerja	Terlaksana	Melalui revidu laporan kinerja yang telah disusun dapat digunakan sebagai alat monitoring capaian NKO di setiap kebiroan
5	Penggunaan ekon.go untuk optimalisasi kinerja dalam pengukuran dan pelaporan	Terlaksana	Telah memaksimalkan penggunaan ekon.go pada fungsi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi

Upaya nyata yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya yaitu menyusun matriks tindak lanjut LHE AKIP Sekre 2024. Penyusunan matriks ini bertujuan untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi di tahun lalu dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terukur. Sehingga menjadi panduan yang jelas dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja atas temuan hasil evaluasi. Hal yang dilakukan adalah melaksanakan pengisian penilaian mandiri Kertas Kerja Evaluasi dan penyusunan laporan kertas kerja Sekretariat tahun 2026.

Pelaksanaan kegiatan diatas dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang mendukung terciptanya efisiensi. Sumber daya itu meliputi pemanfaatan teknologi informasi, seperti zoom meeting. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di bidang evaluasi kinerja. Disamping itu, pemanfaatan waktu dan anggaran secara optimal menjadi perhatian utama

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya :

1. Penggunaan rapat koordinasi menggunakan via aplikasi zoom yang dapat menghemat anggaran.
2. Penggunaan dan peremajaan kembali fasilitas ruang rapat Biro Perencanaan agar dapat digunakan fungsinya.
3. Penggunaan penyimpanan data berbasis Cloud
4. Penggunaan aplikasi berbasis website dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
5. Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang dinarasikan oleh *Person In Charge* di setiap Biro di Sekretariat dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas laporan yang dihasilkan
6. Melaksanakan *Coaching Clinic* atau konsultasi mandiri terhadap para pegawai di yang membutuhkan

Adapun hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain. Jumlah anggaran yang diefisiensikan pada triwulan IV sebesar Rp.15.256.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu (1) Masih belum tersedianya beberapa bukti dukung yang akan digunakan pada Evaluasi AKIP level Eselon I pada unit Sekretariat, seperti: kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan data kinerja ; (2) Belum terimplementasi -kannya peraturan teknis SOP Reward dan Punishment di lingkungan Sekretariat. dan (3) Belum terimplementasikannya hasil pengukuran kinerja sebagai arah dari kebijakan dan penggunaan anggaran

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah (1) Menyusun Dokumen Kelengkapan bukti dukung peraturan/kebijakan teknis terkait AKIP 2026, (2) Meningkatkan kolaborasi antar PIC AKIP eselon II di lingkungan Sekretariat, (3) Melaksanakan aturan/kebijakan SOP terkait Reward dan Punishment dan (4) Melaksanakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pelaksanaan penyusunan kebijakan dan anggaran.

Jakarta, Desember 2025
Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama



Heny Puspitasari